



KABUPATEN
SERANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2025



Lokasi

📍 Serang
Jalan Veteran Nomor 1, Kota Baru
Serang

Hubungi Kami

☎️ (0254) 200271- 20025
🌐 <http://serangkab.go.id/>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta PerkenanNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan LPPD Tahun 2025 ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.7/989/OTDA Hal Pedoman Umum Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif yang menggambarkan kondisi terkini Daerah dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Serang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pemangku urusan (Kepala Perangkat Daerah) yang telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan capaian kinerjanya untuk dikompilasi dalam LPPD ini, serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini. Semoga LPPD ini dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Serang yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa penyusunan LPPD ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Kami akan memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang. Seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam membangun Kabupaten Serang, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah Subhanahu Wata'alaa. Aamiin Ya Robbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, Maret 2026
Bupati Serang



Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
a. Undang Undang Pembentukan Daerah	1
b. Data geografis wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	15
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	16
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	25
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	32
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	34
a. Permasalahan strategis pemerintah daerah	34
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	39
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	41
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	98
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	100
2.1. Capaian Kinerja Makro	100
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	101
2.2.1. Indikator Kinerja Hasil	102
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	141
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	147
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	147
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja	160
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	199
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	200
4.1. Urusan Pendidikan	200
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	200
4.1.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2025	201
4.1.3. Realisasi	202
4.1.4. Alokasi Anggaran	202
4.1.5. Dukungan Personil	203
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	203

4.2.	Urusan Kesehatan	204
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	204
4.2.2.	Target Pencapaian SPM Tahun 2025	206
4.2.3.	Realisasi.....	207
4.2.4.	Alokasi Anggaran	208
4.2.5.	Dukungan Personil	209
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi.....	210
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	210
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	210
4.3.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	213
4.3.3.	Realisasi.....	213
4.3.4.	Alokasi Anggaran	213
4.3.5.	Dukungan Personil	214
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi.....	214
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat.....	215
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	215
4.4.2.	Target Pencapaian SPM Oleh Daerah	217
4.4.3.	Realisasi.....	217
4.4.4.	Alokasi Anggaran	218
4.4.5.	Dukungan Personil	218
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi.....	219
4.5.	Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	219
4.5.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	219
4.5.2.	Target Pencapaian SPM Tahun 2025	221
4.5.3.	Realisasi.....	221
4.5.4.	Alokasi Anggaran	223
4.5.5.	Dukungan Personil	223
4.5.6.	Permasalahan dan Solusi.....	223
4.6.	Urusan Sosial	224
4.6.1.	Jenis Pelayanan Dasar.....	224
4.6.2.	Target Pencapaian SPM Tahun 2025	225
4.6.3.	Realisasi.....	226
4.6.4.	Alokasi Anggaran	227
4.6.5.	Dukungan Personil	227
4.6.6.	Permasalahan dan Solusi.....	228
4.7.	Program dan Kegiatan	228
4.7.1.	Urusan Pendidikan	228
4.7.2.	Urusan Kesehatan.....	229

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum	229
4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat	229
4.7.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	230
4.7.6. Urusan Sosial	230
BAB V PENUTUP	231
LAMPIRAN – LAMPIRAN	233

Tabel 34. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029	202
Tabel 35. Tabel Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025	202
Tabel 36. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025	203
Tabel 37. Jumlah Pegawai Pendukung Pencapaian SPM Kabupaten Serang Tahun 2025 ..	203
Tabel 38. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025	206
Tabel 39. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025	207
Tabel 40. Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025	209
Tabel 41. Jumlah Personil yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025	209
Tabel 42. Ukuran SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota	211
Tabel 43. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025	213
Tabel 44. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025	213
Tabel 45. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025	214
Tabel 46. Jumlah Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025	214
Tabel 47. Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2025	217
Tabel 48. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2025	217
Tabel 49. Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2025	218
Tabel 50. Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang Tahun 2025	218
Tabel 51. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	221
Tabel 52. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	222
Tabel 53. Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	223
Tabel 54. Dukungan Personi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025	223
Tabel 55. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025	226

Tabel 56. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025	226
Tabel 57. Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025.....	227
Tabel 58. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025	227
Tabel 59. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Serang	228
Tabel 60. Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Serang	229
Tabel 61. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang	229
Tabel 62. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang	229
Tabel 63. Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang	230
Tabel 64. Program dan Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Serang.....	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Serang	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Kabupaten Serang ditetapkan berdasarkan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Serang berdasarkan Undang-Undang tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Dengan adanya Undang-Undang ini maka wilayah Kabupaten Serang menjadi Kabupaten yang berada di Wilayah Provinsi Banten.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang. Kabupaten Serang dimekarkan menjadi dua wilayah otonom yakni Kabupaten Serang dan Kota Serang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten Serang maka secara otomatis luas wilayah administrasinya pun berkurang menjadi sebesar 1.467,35 Km².
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Desain pengaturan Kabupaten Serang berdasarkan undang-undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amendemen dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak

Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Serang Dari Wilayah Kota Serang Ke Wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Provinsi Banten Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten maka Ibu Kota Kabupaten Serang dipindahkan dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kabupaten Serang. Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Serang dari wilayah Kota Serang ke wilayah Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Serang.
8. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau. Luas administrasi dilakukan penyesuaian dengan adanya kebijakan satu peta yang kemudian dilakukan pemutakhiran data wilayah Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Menetapkan pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut kode, data wilayah administrasi pemerintahan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
11	36.04.05.2011	Kramatwatu	Lebakwana	6,141911
12	36.04.05.2012	Kramatwatu	Wanayasa	2,220001
13	36.04.05.2013	Kramatwatu	Pelamunan	2,638437
14	36.04.05.2014	Kramatwatu	Teluk Terate	3,457971
15	36.04.05.2015	Kramatwatu	Margatani	1,190892
16	36.04.06.2001	Waringinkurung	Waringinkurung	3,330357
17	36.04.06.2002	Waringinkurung	Telagaluhur	4,806508
18	36.04.06.2003	Waringinkurung	Binangun	5,016623
19	36.04.06.2004	Waringinkurung	Melati	3,484816
20	36.04.06.2005	Waringinkurung	Sasahan	4,907741
21	36.04.06.2006	Waringinkurung	Sukadalem	6,033037
22	36.04.06.2007	Waringinkurung	Sukabares	3,69515
23	36.04.06.2008	Waringinkurung	Sambilawang	4,187155
24	36.04.06.2009	Waringinkurung	Sampir	2,655925
25	36.04.06.2010	Waringinkurung	Cokopsulanjana	5,65198
26	36.04.06.2011	Waringinkurung	Kemuning	2,555388
27	36.04.07.2001	Bojonegara	Bojonegara	6,663123
28	36.04.07.2002	Bojonegara	Mangkunegara	1,624051
29	36.04.07.2003	Bojonegara	Wanakarta	1,455823
30	36.04.07.2004	Bojonegara	Karang Kepuh	2,404705
31	36.04.07.2005	Bojonegara	Lambang Sari	2,815689
32	36.04.07.2006	Bojonegara	Kertasana	2,169022
33	36.04.07.2007	Bojonegara	Margagiri	3,987738
34	36.04.07.2008	Bojonegara	Ukirsari	2,905324
35	36.04.07.2009	Bojonegara	Pakuncen	4,541927
36	36.04.07.2010	Bojonegara	Pangarengan	3,699985
37	36.04.07.2011	Bojonegara	Mekar Jaya	5,073786
38	36.04.08.2001	Pulo Ampel	Pulo Ampel	4,647453
39	36.04.08.2002	Pulo Ampel	Sumuranja	3,044868
40	36.04.08.2003	Pulo Ampel	Mangunreja	5,711774
41	36.04.08.2004	Pulo Ampel	Kedungsoka	7,246485
42	36.04.08.2005	Pulo Ampel	Salira	4,753536
43	36.04.08.2006	Pulo Ampel	Argawana	6,131456
44	36.04.08.2007	Pulo Ampel	Banyuwangi	3,99986
45	36.04.08.2008	Pulo Ampel	Margasari	3,85187
46	36.04.08.2009	Pulo Ampel	Pulo Panjang	6,736702
47	36.04.09.2001	Ciruas	Ciruas	1,089382
48	36.04.09.2002	Ciruas	Citerep	1,396346
49	36.04.09.2003	Ciruas	Pulo	4,654142
50	36.04.09.2004	Ciruas	Kadikaran	1,666714
51	36.04.09.2005	Ciruas	Kepandean	1,784703
52	36.04.09.2006	Ciruas	Gosara	1,036476
53	36.04.09.2009	Ciruas	Bumijaya	1,578355
54	36.04.09.2010	Ciruas	Penggalang	3,139879
55	36.04.09.2011	Ciruas	Pamong	2,704925

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
56	36.04.09.2012	Ciruas	Cigelam	4,265787
57	36.04.09.2013	Ciruas	Singamerta	1,842904
58	36.04.09.2014	Ciruas	Ranjeng	1,48052
59	36.04.09.2015	Ciruas	Beberan	2,602105
60	36.04.09.2016	Ciruas	Kaserangan	3,918194
61	36.04.09.2017	Ciruas	Pelawad	0,460829
62	36.04.11.2001	Kragilan	Kragilan	4,028307
63	36.04.11.2002	Kragilan	Silebu	3,975545
64	36.04.11.2003	Kragilan	Pematang	2,268089
65	36.04.11.2004	Kragilan	Dukuh	3,672047
66	36.04.11.2005	Kragilan	Undar Andir	3,270654
67	36.04.11.2006	Kragilan	Sukajadi	2,792774
68	36.04.11.2007	Kragilan	Sentul	3,85028
69	36.04.11.2008	Kragilan	Jeruk Tipis	3,264848
70	36.04.11.2011	Kragilan	Kendayakan	2,869078
71	36.04.11.2012	Kragilan	Tegalmaja	2,290521
72	36.04.11.2013	Kragilan	Cisait	3,011282
73	36.04.11.2014	Kragilan	Kramatjati	2,755371
74	36.04.12.2001	Pontang	Pontang	1,360946
75	36.04.12.2002	Pontang	Sukanegara	3,733836
76	36.04.12.2003	Pontang	Linduk	11,170985
77	36.04.12.2004	Pontang	Pulokencana	3,54772
78	36.04.12.2006	Pontang	Kelapian	2,086795
79	36.04.12.2008	Pontang	Kubang Puji	7,350242
80	36.04.12.2009	Pontang	Domas	6,653327
81	36.04.12.2010	Pontang	Singarajan	1,681523
82	36.04.12.2011	Pontang	Kaserangan	2,622847
83	36.04.12.2012	Pontang	Wanayasa	7,266205
84	36.04.12.2013	Pontang	Sukajaya	12,804439
85	36.04.13.2001	Tirtayasa	Tirtayasa	2,576066
86	36.04.13.2002	Tirtayasa	Samparwadi	2,684563
87	36.04.13.2003	Tirtayasa	Kemanisan	1,732856
88	36.04.13.2004	Tirtayasa	Pontang Legon	2,24412
89	36.04.13.2005	Tirtayasa	Kebon	2,61091
90	36.04.13.2006	Tirtayasa	Sujung	9,859709
91	36.04.13.2007	Tirtayasa	Lontar	5,399793
92	36.04.13.2008	Tirtayasa	Susukan	7,762615
93	36.04.13.2009	Tirtayasa	Wargasara	2,76372
94	36.04.13.2010	Tirtayasa	Laban	3,202533
95	36.04.13.2011	Tirtayasa	Tengkurak	11,334768
96	36.04.13.2012	Tirtayasa	Alang-alang	5,279734
97	36.04.13.2013	Tirtayasa	Kebuyutan	2,104374
98	36.04.13.2014	Tirtayasa	Puser	1,429764
99	36.04.14.2001	Tanara	Tanara	6,528115
100	36.04.14.2002	Tanara	Cerukcuk	4,515344

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
101	36.04.14.2003	Tanara	Tenjoayu	19,106423
102	36.04.14.2004	Tanara	Sukamanah	1,864805
103	36.04.14.2005	Tanara	Lempuyang	4,765883
104	36.04.14.2006	Tanara	Siremen	2,810225
105	36.04.14.2007	Tanara	Bendung	1,716061
106	36.04.14.2008	Tanara	Pedaleman	4,613731
107	36.04.14.2009	Tanara	Cibodas	1,663415
108	36.04.15.2001	Cikande	Cikande	5,896497
109	36.04.15.2002	Cikande	Leuwi Limus	3,69652
110	36.04.15.2003	Cikande	Nambo Udik	4,693086
111	36.04.15.2004	Cikande	Parigi	7,337275
112	36.04.15.2005	Cikande	Koper	3,899143
113	36.04.15.2006	Cikande	Bakung	2,949224
114	36.04.15.2007	Cikande	Julang	4,620725
115	36.04.15.2008	Cikande	Sukatani	3,189639
116	36.04.15.2009	Cikande	Situterate	2,204379
117	36.04.15.2010	Cikande	Kamurang	2,305507
118	36.04.15.2011	Cikande	Gembor Udik	4,182713
119	36.04.15.2012	Cikande	Songgom Jaya	3,055635
120	36.04.15.2013	Cikande	Cikande Permai	1,020855
121	36.04.16.2001	Kibin	Kibin	4,537187
122	36.04.16.2002	Kibin	Ketos	3,397493
123	36.04.16.2003	Kibin	Cijeruk	3,685769
124	36.04.16.2004	Kibin	Nagara	3,443295
125	36.04.16.2005	Kibin	Nambo Ilir	4,719027
126	36.04.16.2006	Kibin	Barengkok	3,349472
127	36.04.16.2007	Kibin	Sukamaju	3,032484
128	36.04.16.2008	Kibin	Tambak	2,170902
129	36.04.16.2009	Kibin	Ciagel	2,242835
130	36.04.17.2001	Carenang	Carenang	3,781777
131	36.04.17.2002	Carenang	Pamanuk	3,446511
132	36.04.17.2003	Carenang	Mandaya	2,840062
133	36.04.17.2004	Carenang	Teras	3,865499
134	36.04.17.2006	Carenang	Ragas Masigit	4,717057
135	36.04.17.2007	Carenang	Walikukun	3,879147
136	36.04.17.2009	Carenang	Panenjoan	2,62535
137	36.04.17.2010	Carenang	Mekarsari	3,916066
138	36.04.18.2001	Binuang	Binuang	1,738416
139	36.04.18.2002	Binuang	Cakung	3,710386
140	36.04.18.2003	Binuang	Renged	4,531544
141	36.04.18.2004	Binuang	Gembor	5,932552
142	36.04.18.2005	Binuang	Warakas	3,379611
143	36.04.18.2006	Binuang	Sukamampir	2,820944
144	36.04.18.2007	Binuang	Lamaran	6,609844
145	36.04.19.2001	Petir	Petir	3,679452

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
146	36.04.19.2002	Petir	Cirangkong	2,965031
147	36.04.19.2003	Petir	Tambiluk	5,059421
148	36.04.19.2004	Petir	Sindangsari	3,601801
149	36.04.19.2005	Petir	Padasuka	2,228282
150	36.04.19.2006	Petir	Seuat	4,299646
151	36.04.19.2007	Petir	Nagara Padang	4,642716
152	36.04.19.2008	Petir	Kadugene	2,998275
153	36.04.19.2009	Petir	Cireunde	3,768248
154	36.04.19.2010	Petir	Sanding	3,060353
155	36.04.19.2011	Petir	Kampung Baru	2,257436
156	36.04.19.2012	Petir	Mekar Baru	3,454181
157	36.04.19.2013	Petir	Seuat Jaya	2,367519
158	36.04.19.2014	Petir	Kubang Jaya	2,554195
159	36.04.19.2015	Petir	Bojong Nangka	2,287509
160	36.04.20.2001	Tunjung Teja	Tanjung Teja	4,280459
161	36.04.20.2002	Tunjung Teja	Sukasari	5,379643
162	36.04.20.2003	Tunjung Teja	Panunggulan	4,555994
163	36.04.20.2004	Tunjung Teja	Malanggah	6,406751
164	36.04.20.2005	Tunjung Teja	Kemuning	4,31554
165	36.04.20.2006	Tunjung Teja	Bojong Menteng	6,901065
166	36.04.20.2007	Tunjung Teja	Bojong Catang	4,586409
167	36.04.20.2008	Tunjung Teja	Bojong Pandan	3,826271
168	36.04.20.2009	Tunjung Teja	Pancaregang	2,147193
169	36.04.22.2001	Baros	Baros	2,54213
170	36.04.22.2002	Baros	Tejamari	2,581355
171	36.04.22.2003	Baros	Panyirapan	2,24125
172	36.04.22.2004	Baros	Sidamukti	2,202898
173	36.04.22.2005	Baros	Sukacai	2,042236
174	36.04.22.2006	Baros	Tamansari	3,153688
175	36.04.22.2007	Baros	Sindangmandi	4,328371
176	36.04.22.2008	Baros	Cisalam	4,506652
177	36.04.22.2009	Baros	Sukamanah	2,235763
178	36.04.22.2010	Baros	Sukamenak	2,466222
179	36.04.22.2011	Baros	Curug Agung	1,911389
180	36.04.22.2012	Baros	Padasuka	2,142549
181	36.04.22.2013	Baros	Sinarmukti	1,723244
182	36.04.22.2014	Baros	Suka Indah	1,991913
183	36.04.23.2001	Cikeusal	Cikeusal	4,09263
184	36.04.23.2002	Cikeusal	Dahu	4,841043
185	36.04.23.2003	Cikeusal	Katulisan	2,270763
186	36.04.23.2004	Cikeusal	Sukamaju	2,871484
187	36.04.23.2005	Cikeusal	Cilayang	3,229724
188	36.04.23.2006	Cikeusal	Sukamenak	2,645766
189	36.04.23.2007	Cikeusal	Cimaung	3,512247
190	36.04.23.2008	Cikeusal	Panyabrangan	3,490685

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
191	36.04.23.2009	Cikeusal	Gandayasa	4,818036
192	36.04.23.2010	Cikeusal	Bantar Panjang	3,433239
193	36.04.23.2011	Cikeusal	Sukaratu	2,294618
194	36.04.23.2012	Cikeusal	Harundang	2,005021
195	36.04.23.2013	Cikeusal	Sukarame	3,051759
196	36.04.23.2014	Cikeusal	Panosogan	2,673529
197	36.04.23.2015	Cikeusal	Mongpok	4,246347
198	36.04.23.2016	Cikeusal	Sukaraja	4,158087
199	36.04.23.2017	Cikeusal	Cilayang Guha	2,649663
200	36.04.24.2001	Pamarayan	Pamarayan	3,018387
201	36.04.24.2002	Pamarayan	Damping	3,363186
202	36.04.24.2003	Pamarayan	Wirana	5,075988
203	36.04.24.2004	Pamarayan	Keboncau	5,783315
204	36.04.24.2005	Pamarayan	Pudar	5,8661
205	36.04.24.2006	Pamarayan	Binong	3,274522
206	36.04.24.2007	Pamarayan	Sangiang	3,818934
207	36.04.24.2008	Pamarayan	Kampungbaru	4,004177
208	36.04.24.2010	Pamarayan	Pasirlimus	8,697542
209	36.04.24.2018	Pamarayan	Pasir Kembang	2,118804
210	36.04.25.2001	Kopo	Kopo	2,786701
211	36.04.25.2002	Kopo	Garut	4,120653
212	36.04.25.2003	Kopo	Nanggung	6,470002
213	36.04.25.2004	Kopo	Cidahu	4,468996
214	36.04.25.2005	Kopo	Nyompok	3,521463
215	36.04.25.2006	Kopo	Gabus	3,448775
216	36.04.25.2007	Kopo	Carenang Udik	3,192477
217	36.04.25.2008	Kopo	Rancasumur	3,661322
218	36.04.25.2009	Kopo	Babakanjaya	2,149841
219	36.04.25.2010	Kopo	Mekarbaru	2,694045
220	36.04.26.2001	Jawilan	Jawilan	3,934535
221	36.04.26.2002	Jawilan	Bojot	3,895741
222	36.04.26.2003	Jawilan	Cemplang	7,551281
223	36.04.26.2004	Jawilan	Pagintungan	8,804696
224	36.04.26.2005	Jawilan	Pasirbuyut	4,960399
225	36.04.26.2006	Jawilan	Majasari	3,92894
226	36.04.26.2007	Jawilan	Parakan	3,930768
227	36.04.26.2008	Jawilan	Kareo	3,589939
228	36.04.26.2009	Jawilan	Junti	4,34979
229	36.04.27.2001	Ciomas	Ujungtebu	7,986274
230	36.04.27.2002	Ciomas	Siketug	6,826936
231	36.04.27.2003	Ciomas	Lebak	4,740114
232	36.04.27.2004	Ciomas	Pondok Kahuru	2,179829
233	36.04.27.2005	Ciomas	Sukabares	1,481772
234	36.04.27.2006	Ciomas	Sukarena	7,66982
235	36.04.27.2007	Ciomas	Sukadana	2,972818

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
236	36.04.27.2008	Ciomas	Cemplang	6,175118
237	36.04.27.2009	Ciomas	Cisitu	6,054766
238	36.04.27.2010	Ciomas	Citaman	5,157166
239	36.04.27.2011	Ciomas	Panyaungan Jaya	5,368588
240	36.04.28.2001	Pabuaran	Pabuaran	4,77586
241	36.04.28.2006	Pabuaran	Kadubeureum	5,675605
242	36.04.28.2007	Pabuaran	Tanjungsari	3,106893
243	36.04.28.2009	Pabuaran	Pancanegara	6,69727
244	36.04.28.2010	Pabuaran	Sindangsari	7,713307
245	36.04.28.2012	Pabuaran	Sindangheula	6,287349
246	36.04.28.2013	Pabuaran	Pasanggrahan	3,291582
247	36.04.28.2015	Pabuaran	Talaga Warna	2,526932
248	36.04.29.2001	Padarincang	Padarincang	2,553252
249	36.04.29.2002	Padarincang	Bugel	4,6984
250	36.04.29.2003	Padarincang	Cibojong	11,268602
251	36.04.29.2004	Padarincang	Citasuk	10,859966
252	36.04.29.2005	Padarincang	Cisaat	1,863193
253	36.04.29.2006	Padarincang	Ciomas	3,309976
254	36.04.29.2007	Padarincang	Barugbug	11,303107
255	36.04.29.2008	Padarincang	Batu Kuwung	18,820856
256	36.04.29.2009	Padarincang	Kramatlaban	2,84583
257	36.04.29.2010	Padarincang	Kalumpang	7,681935
258	36.04.29.2011	Padarincang	Kadubeureum	8,423544
259	36.04.29.2012	Padarincang	Cipayung	6,157597
260	36.04.29.2013	Padarincang	Curug Goong	2,378864
261	36.04.29.2014	Padarincang	Kadu Kempong	5,469702
262	36.04.30.2001	Anyar	Anyar	1,630614
263	36.04.30.2002	Anyar	Sindang Mandi	12,359653
264	36.04.30.2003	Anyar	Cikoneng	15,259273
265	36.04.30.2004	Anyar	Tanjung Manis	2,117151
266	36.04.30.2005	Anyar	Bandulu	5,370418
267	36.04.30.2006	Anyar	Bunihara	4,917782
268	36.04.30.2007	Anyar	Kosambiranyok	4,691195
269	36.04.30.2008	Anyar	Banjarsari	4,141251
270	36.04.30.2009	Anyar	Mekarsari	2,554793
271	36.04.30.2010	Anyar	Sindangkarya	8,53036
272	36.04.30.2011	Anyar	Tambang Ayam	3,160316
273	36.04.30.2012	Anyar	Grogol Indah	3,16668
274	36.04.31.2001	Cinangka	Cinangka	8,473704
275	36.04.31.2002	Cinangka	Bantarwaru	19,980041
276	36.04.31.2003	Cinangka	Pasauran	4,419796
277	36.04.31.2004	Cinangka	Bulkan	6,656086
278	36.04.31.2005	Cinangka	Karang Suraga	8,345469
279	36.04.31.2006	Cinangka	Umbul Tanjung	12,013008
280	36.04.31.2007	Cinangka	Kubang Baros	6,600788

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
281	36.04.31.2008	Cinangka	Rancasanggal	8,180732
282	36.04.31.2009	Cinangka	Cikolelet	16,278304
283	36.04.31.2010	Cinangka	Sindanglaya	5,388074
284	36.04.31.2011	Cinangka	Kamasan	6,803567
285	36.04.31.2012	Cinangka	Bantarwangi	5,495302
286	36.04.31.2013	Cinangka	Mekarsari	9,209704
287	36.04.31.2014	Cinangka	Baros Jaya	5,245151
288	36.04.32.2001	Mancak	Mancak	4,839985
289	36.04.32.2002	Mancak	Ciwarna	13,369087
290	36.04.32.2003	Mancak	Angsana	6,892702
291	36.04.32.2004	Mancak	Talaga	8,662239
292	36.04.32.2005	Mancak	Cikedung	19,597838
293	36.04.32.2006	Mancak	Sigedong	6,423372
294	36.04.32.2007	Mancak	Sangiang	3,012021
295	36.04.32.2008	Mancak	Pasirwaru	3,819626
296	36.04.32.2009	Mancak	Waringin	6,116481
297	36.04.32.2010	Mancak	Winong	4,683041
298	36.04.32.2011	Mancak	Batukuda	8,266087
299	36.04.32.2012	Mancak	Labuan	3,971864
300	36.04.32.2013	Mancak	Bale Kambang	3,887775
301	36.04.32.2014	Mancak	Bale Kencana	4,396973
302	36.04.33.2001	Gunungsari	Gunungsari	12,373419
303	36.04.33.2002	Gunungsari	Ciherang	9,944637
304	36.04.33.2003	Gunungsari	Tamiang	3,277099
305	36.04.33.2004	Gunungsari	Sukalaba	2,693745
306	36.04.33.2005	Gunungsari	Kadu Agung	12,389479
307	36.04.33.2006	Gunungsari	Luwuk	8,902919
308	36.04.33.2007	Gunungsari	Curug Sulanjana	3,853748
309	36.04.34.2001	Bandung	Bandung	4,690518
310	36.04.34.2002	Bandung	Mander	3,362264
311	36.04.34.2003	Bandung	Panamping	3,663492
312	36.04.34.2004	Bandung	Pangawinan	2,948774
313	36.04.34.2005	Bandung	Malabar	2,3835
314	36.04.34.2006	Bandung	Blokang	3,021307
315	36.04.34.2007	Bandung	Babakan	2,973304
316	36.04.34.2008	Bandung	Pringwulung	2,742739
317	36.04.35.2001	Lebak Wangi	Kamaruton	3,235111
318	36.04.35.2002	Lebak Wangi	Teras Bendung	3,489816
319	36.04.35.2003	Lebak Wangi	Lebak Wangi	4,05497
320	36.04.35.2004	Lebak Wangi	Lebak Kepuh	3,317743
321	36.04.35.2005	Lebak Wangi	Kencana Harapan	4,658879
322	36.04.35.2006	Lebak Wangi	Pegandikan	4,804109
323	36.04.35.2007	Lebak Wangi	Purwadadi	1,706985
324	36.04.35.2008	Lebak Wangi	Bolang	1,686537
325	36.04.35.2009	Lebak Wangi	Tirem	3,918528

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah Tahun 2025 (Km2)
326	36.04.35.2010	Lebak Wangi	Kebonratu	3,868551
Luas Total (Km2)				1.471,543

Sumber data: Bagian Tata Pemerintahan Kab. Serang berdasarkan Surat Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor B-4.25/PBNR-BIG/IGD.04.04/9/2025

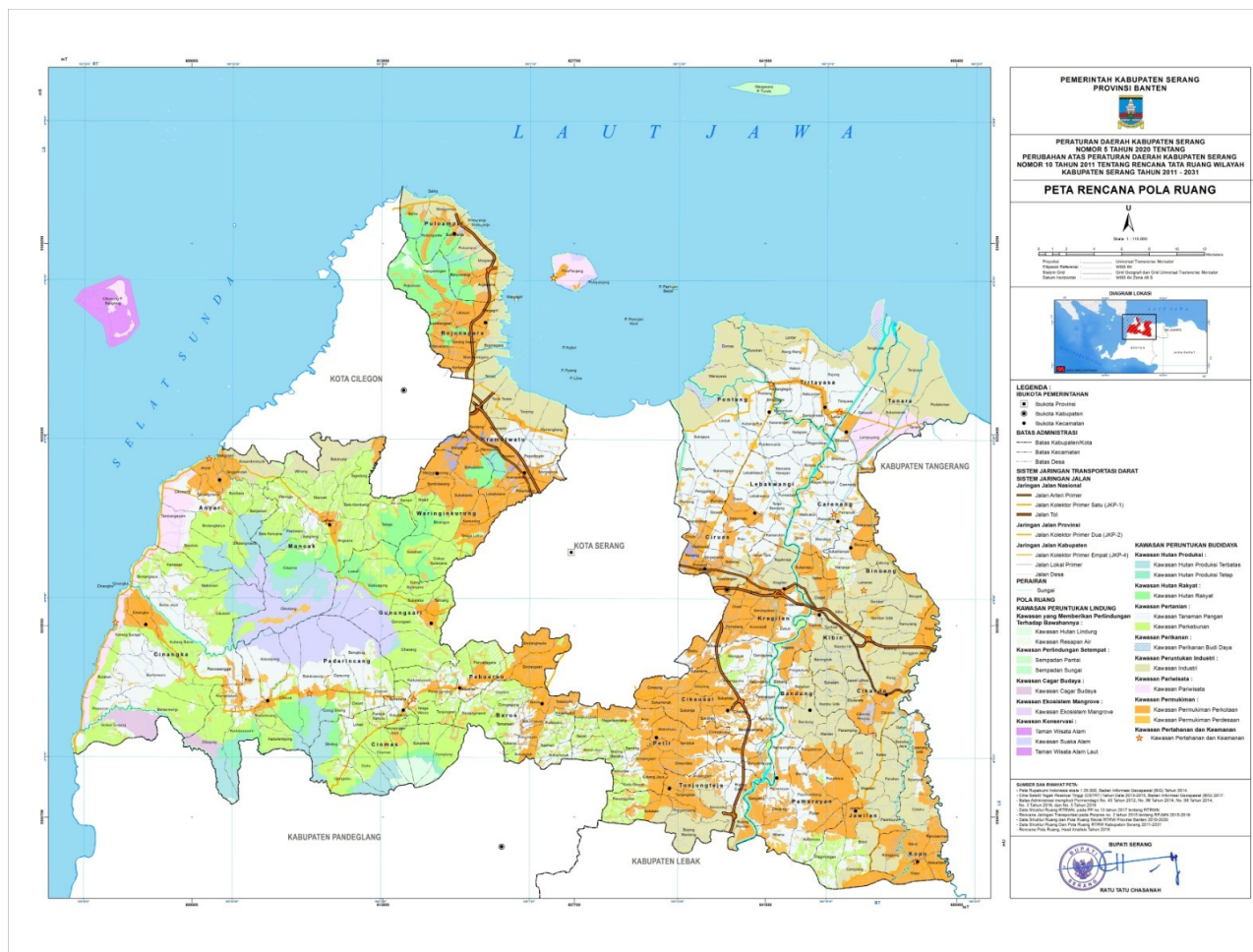
Di Kabupaten Serang terdapat pulau-pulau yang berada di wilayah perairan dan tercatat sebanyak 18 pulau diantaranya adalah tersebut pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang

No	Kode Pulau	Nama Pulau	Koordinat
1	36.04.40001	Pulau Kubur	05°58'54.11" S 106°09'03.75" T
2	36.04.40002	Pulau Lima	06°00'05.13" S 106°09'17.44" T
3	36.04.40003	Pulau Pamujan Besar	05°56'30.66" S 106°13'07.11" T
4	36.04.40004	Pulau Pamujan Kecil	05°57'51.58" S 106°11'34.61" T
5	36.04.40005	Pulau Pisang	05°59'49.35" S 106°09'00.55" T
6	36.04.40006	Pulau Lingsang	05°58'04.61" S 106°21'28.68" T
7	36.04.40007	Pulau Sangiang	05°57'21.24" S 105°51'11.82" T
		Pulau Tinil	05°57'15.96" S 106°21'10.85" T
8	36.04.40009	Pulau Tunda	05°48'44.97" S 106°16'47.58" T
9	36.04.40010	Pulau Cikantung	05°58'04.75" S 106°06'23.94" T
10	36.04.40011	Pulau Kalih Selatan	05°54'05.96" S 106°05'35.58" T
11	36.04.40012	Pulau Kalih Utara	05°53'53.42" S 106°05'24.49" T
12	36.04.40013	Pulau Karangcawene	06°08'15.30" S 105°51'07.32" T
13	36.04.40014	Pulau Karangparejakah	06°08'16.20" S 105°51'08.09" T
14	36.04.40015	Pulau Kemanisan	05°57'49.08" S 106°06'32.09" T
15	36.04.40016	Pulau Panjang	05°55'51.97" S 106°09'11.58" T
16	36.04.40017	Pulau Salira	05°52'46.11" S 106°03'38.94" T
17	36.04.40018	Pulau Semut	05°56'18.52" S 106°10'11.96" T
18	36.04.40019	Pulau Tarahan	05°56'57.97" S 106°06'56.58" T

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Serang



Sumber : Pemerintah Kabupaten Serang

3. Kondisi Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian antara 0 - 1.778 m dari permukaan laut (mdpl) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang, sehingga secara topografi tidak akan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Ketinggian tertinggi di wilayah Kabupaten Serang terletak di Puncak Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat ini terbagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu :

Ketinggian tempat 0-59 mdpl	= 87.511,44 Ha	(959,45%)
Ketinggian tempat 59-187 mdpl	= 34.892,40 Ha	(23,70%)
Ketinggian tempat 187-393 mdpl	= 17.025,40 Ha	(11,57%)
Ketinggian tempat 393-677 mdpl	= 6.024,16 Ha	(4,09%)
Ketinggian tempat 677-1040 mdpl	= 1.210,15 Ha	(0,82%)
Ketinggian tempat 1040-1722 mdpl	= 550,45 Ha	(0,37%)

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Carenang, Ciruas, Kasemen, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, Serang hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah. Penyebaran wilayah perbukitan berada di wilayah bagian barat yang menyebar dari utara ke selatan dengan ketinggian sekitar 100 m.

Sedangkan satuan pegunungan menempati bagian selatan dan ujung utara sebelah barat. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh ketinggian kurang dari 500 mdpl yang meliputi kurang lebih 97,5% dari luas wilayah dan tersebar pada semua wilayah kecamatan kecuali Kecamatan Ciomas.

4. Kondisi Hidrologi

Kondisi Hidrologi di wilayah Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari DAS Cidurian, DAS Ciujung, DAS Cidanau dan DAS Cibanten. Pengelolaan sungai mengatur adanya Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik SWS maupun DAS yang ada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 km). Selain itu terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai), yakni pengelolaan satu

atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan.

Di Kabupaten Serang hanya ada SWS Ciujung-Ciliman, yang terdiri dari DAS-DAS Cidurian, Ciujung, dan Cibanten. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat, Selat Sunda. Di sebelah selatannya terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yakni pada umumnya ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten.

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% merupakan daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (peneplainisasi) dan 10% berupa dataran pesisir. Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Tabel 3. DAS/Sub DAS di Kabupaten Serang

Das		Sub Das		Luas (Ha)
1	Cidurian			184.74600
		1	Cidurian Hulu	37.194,00
		2	Cibeureum	28.391,00
		3	Cidurian Hilir	35.542,00
		4	Cimanceuri Hulu	40.501,00
		5	Cirarab	33.795,00
		6	Cimanceuri Hilir	9.323,00
2	Ciujung			279.838,00
		1	Ciujung Hulu (a)	21.247,00
		2	Ciujung Hulu (b)	136.879,00
		3	Ciujung Tengah	23.444,00
		4	Ciujung Hilir	40.221,00
		5	Ciujung Kulon (Cikeuruh)	58.047,00
3	Cibanten			80.170,00
		1	Cibanten	21.580,00
		2	K. Grogol	5.750,00
		3	Bojonegara	5.270,00
		4	K. Lombang	7.560,00
		5	Cibeber	15.320,00
		6	K. Anyer	6.560,00
		7	Cikoneng	6.910,00
		8	Cipasuruan	11.220,00
4	Cidanau			22.620,00
		1	Cikakalumpay	7.831,00
		2	Cisaat	4.900,00
		3	Cisawarna	4.579,00
		4	Cibojong	2.960,00
		5	Cihoreang	1.040,00
		6	Cicangkadan	1.310,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Serang 2025-2029

Kabupaten Serang dilalui oleh 2 (dua) sungai besar, yaitu Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian yang keduanya mengalir ke arah utara dan bermuara di Laut Jawa. Selain itu juga terdapat sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Cidanau dan Sungai Anyar serta beberapa sungai kecil lainnya yang bermuara di Selat Sunda. Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun.

Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran rectanguler. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT Krakatau Steel yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk spring belt pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data kependudukan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk di Kabupaten Serang tahun 2025 per Semester II adalah sebanyak **1.836.077 Orang**.

Kecamatan Cikande sebagai kecamatan dengan kawasan industri yang besar merupakan kecamatan dengan penduduk terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 123.519 jiwa, diikuti Kecamatan Kramatwatu selain mempunyai kawasan industri juga merupakan Kecamatan yang diapit Kota Cilegon dan Kota Serang menjadikan Kramatwatu memiliki kawasan permukiman yang potensial, Kecamatan Kramatwatu memiliki jumlah penduduk sebesar 109.053 Jiwa. Kecamatan Kragilan berada pada posisi ke-3 besar yang pada Tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sebesar 91.186 Jiwa menggeser Kecamatan Ciruas yang pada tahun 2024 berada di posisi ketiga, Kecamatan Ciruas sebagai Ibukota Kabupaten Serang pada tahun 2025 memiliki jumlah penduduk sebesar 90.319 Jiwa.

Sedangkan Jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Serang berada pada Kecamatan Gunungsari dengan penduduk sebesar 27.281 Jiwa.

Tabel 5. Jumlah Kecamatan, Desa dan Penduduk

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KRAMATWATU	55.507	53.546	109.053
	KRAMATWATU	5.429	5.360	10.789
	MARGASANA	3.335	3.134	6.469
	PEJATEN	6.118	5.749	11.867
	TOYOMERTO	2.305	2.169	4.474
	HARJATANI	5.754	5.708	11.462
	SERDANG	2.742	2.672	5.414
	TERATE	2.425	2.295	4.720
	TONJONG	2.090	2.032	4.122
	PAMENGKANG	2.854	2.735	5.589
	PEGADINGAN	3.186	3.015	6.201
	LEBAKWANA	6.375	6.184	12.559
	WANAYASA	2.647	2.529	5.176
	PELAMUNAN	4.718	4.458	9.176
	TELUK TERATE	1.040	989	2.029
	MARGATANI	4.489	4.517	9.006
2	WARINGINKURUNG	28.353	27.426	55.779
	WARINGINKURUNG	7.271	7.250	14.521
	TALAGA LUHUR	1.761	1.628	3.389
	BINANGUN	1.811	1.746	3.557
	MELATI	1.371	1.298	2.669
	SASAHAN	1.803	1.721	3.524
	SUKADALEM	4.698	4.486	9.184
	SUKABARES	2.459	2.466	4.925
	SAMBILAWANG	2.747	2.658	5.405
	SAMPIR	1.219	1.165	2.384
	COKOPSULANJANA	1.193	1.139	2.332
	KEMUNING	2.020	1.869	3.889
3	BOJONEGARA	28.117	27.185	55.302
	BOJONEGARA	3.239	3.234	6.473
	MANGKUNEGARA	2.894	2.944	5.838
	WANAKARTA	1.746	1.611	3.357
	KARANG KEPUH	3.129	3.047	6.176
	LAMBANGSARI	2.729	2.545	5.274
	KERTASANA	2.914	2.793	5.707
	MARGAGIRI	3.518	3.535	7.053
	UKIRSARI	1.881	1.775	3.656
	PAKUNCEN	1.955	1.829	3.784
	PANGARENGAN	2.086	2.000	4.086
	MEKAR JAYA	2.026	1.872	3.898
4	PULO AMPEL	21.618	21.270	42.888
	PULO AMPEL	1.622	1.503	3.125

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	SUMURANJA	2.587	2.584	5.171
	MANGUNREJA	1.820	1.827	3.647
	KEDUNGSOKA	2.827	2.654	5.481
	SALIRA	2.638	2.562	5.200
	ARGAWANA	4.118	4.091	8.209
	BANYUWANGI	2.073	2.153	4.226
	MARGASARI	2.130	2.169	4.299
	PULO PANJANG	1.803	1.727	3.530
5	CIRUAS	45.744	44.575	90.319
	CIRUAS	1.531	1.413	2.944
	CITEREP	3.385	3.348	6.733
	PULO	3.642	3.598	7.240
	KADIKARAN	2.075	2.024	4.099
	KEPANDEAN	3.015	2.947	5.962
	GOSARA	1.357	1.293	2.650
	BUMIJAYA	2.446	2.422	4.868
	PENGGALANG	2.302	2.186	4.488
	PAMONG	2.365	2.195	4.560
	CIGELAM	2.910	2.761	5.671
	SINGAMERTA	2.299	2.194	4.493
	RANJENG	7.989	8.080	16.069
	BEBERAN	2.333	2.222	4.555
	KASERANGAN	2.470	2.295	4.765
	PELAWAD	5.625	5.597	11.222
6	KRAGILAN	46.072	45.114	91.186
	KRAGILAN	5.037	4.898	9.935
	SILEBU	3.473	3.281	6.754
	PEMATANG	2.823	2.832	5.655
	DUKUH	2.996	2.906	5.902
	UNDAR ANDIR	2.096	2.062	4.158
	SUKAJADI	3.425	3.276	6.701
	SENTUL	6.631	6.483	13.114
	JERUK TIPIS	2.706	2.778	5.484
	KENDAYAKAN	7.357	7.363	14.720
	TEGALMAJA	1.938	1.909	3.847
	CISAIT	5.553	5.331	10.884
	KRAMATJATI	2.037	1.995	4.032
7	PONTANG	26.528	25.976	52.504
	PONTANG	2.373	2.239	4.612
	SUKANEGARA	1.548	1.463	3.011
	LINDUK	3.023	3.098	6.121
	PULOKENCANA	2.391	2.457	4.848
	KELAPIAN	2.084	2.051	4.135

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	KUBANG PUJI	3.146	3.024	6.170
	DOMAS	2.786	2.694	5.480
	SINGARAJAN	2.357	2.403	4.760
	KASERANGAN	2.592	2.487	5.079
	WANAYASA	1.529	1.528	3.057
	SUKAJAYA	2.699	2.532	5.231
8	TIRTAYASA	27.250	26.462	53.712
	TIRTAYASA	2.232	2.158	4.390
	SAMPARWADI	1.857	1.809	3.666
	KEMANISAN	1.577	1.511	3.088
	PONTANG LEGON	1.751	1.713	3.464
	KEBON	1.780	1.788	3.568
	SUJUNG	2.821	2.860	5.681
	LONTAR	3.651	3.441	7.092
	SUSUKAN	2.531	2.479	5.010
	WARGASARA	859	785	1.644
	LABAN	1.493	1.504	2.997
	TENGKURAK	1.873	1.765	3.638
	ALANG-ALANG	1.757	1.742	3.499
	KEBUYUTAN	1.304	1.238	2.542
	PUSER	1.764	1.669	3.433
9	TANARA	25.019	24.423	49.442
	TANARA	1.725	1.658	3.383
	CERUKCUK	2.986	2.957	5.943
	TENJOAYU	2.880	2.760	5.640
	SUKAMANAH	1.853	1.783	3.636
	LEMPUYANG	4.008	4.031	8.039
	SIREMEN	2.497	2.454	4.951
	BENDUNG	3.297	3.213	6.510
	PEDALEMAN	3.242	3.122	6.364
	CIBODAS	2.531	2.445	4.976
10	CIKANDE	62.669	60.850	123.519
	CIKANDE	12.233	12.085	24.318
	LEUWI LIMUS	4.235	4.092	8.327
	NAMBO UDIK	3.804	3.579	7.383
	PARIGI	5.292	5.100	10.392
	KOPER	3.978	3.748	7.726
	BAKUNG	3.603	3.506	7.109
	JULANG	4.234	4.111	8.345
	SUKATANI	2.980	2.845	5.825
	SITUTERATE	4.751	4.576	9.327
	KAMURANG	2.993	2.812	5.805
	GEMBOR UDIK	3.021	2.917	5.938

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	SONGGOM JAYA	2.489	2.503	4.992
	CIKANDE PERMAI	9.056	8.976	18.032
11	KIBIN	33.586	33.240	66.826
	KIBIN	4.475	4.407	8.882
	KETOS	2.353	2.323	4.676
	CIJERUK	3.184	3.168	6.352
	NAGARA	6.046	5.920	11.966
	NAMBO ILIR	4.418	4.389	8.807
	BARENGKOK	3.092	3.158	6.250
	SUKAMAJU	2.708	2.679	5.387
	TAMBAK	3.553	3.553	7.106
	CIAGEL	3.757	3.643	7.400
12	CARENANG	22.595	22.193	44.788
	CARENANG	1.796	1.683	3.479
	PAMANUK	2.443	2.403	4.846
	MANDAYA	2.974	2.911	5.885
	TERAS	3.550	3.465	7.015
	RAGAS MASIGIT	3.631	3.608	7.239
	WALIKUKUN	2.804	2.779	5.583
	PANENJOAN	2.640	2.655	5.295
	MEKARSARI	2.757	2.689	5.446
13	BINUANG	18.580	18.135	36.715
	BINUANG	2.769	2.711	5.480
	CAKUNG	2.383	2.292	4.675
	RENGED	1.348	1.285	2.633
	GEMBOR	4.469	4.342	8.811
	WARAKAS	2.344	2.264	4.608
	SUKAMAMPIR	2.448	2.407	4.855
	LAMARAN	2.819	2.834	5.653
14	PETIR	36.593	34.441	71.034
	PETIR	3.372	3.254	6.626
	CIRANGKONG	2.499	2.338	4.837
	TAMBILUK	4.527	4.254	8.781
	SINDANGSARI	3.430	3.210	6.640
	PADASUKA	1.655	1.545	3.200
	SEUAT	2.690	2.385	5.075
	NAGARA PADANG	2.869	2.780	5.649
	KADUGENEP	2.113	2.052	4.165
	CIREUNDEU	1.817	1.708	3.525
	SANDING	1.879	1.748	3.627
	KAMPUNG BARU	1.622	1.463	3.085
	MEKAR BARU	2.940	2.850	5.790

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	SEUAT JAYA	1.847	1.772	3.619
	KUBANG JAYA	2.039	1.913	3.952
	BOJONG NANGKA	1.294	1.169	2.463
15	TUNJUNG TEJA	27.432	26.087	53.519
	TUNJUNG TEJA	2.782	2.729	5.511
	SUKASARI	4.078	3.842	7.920
	PANUNGGULAN	3.583	3.433	7.016
	MALANGGAH	4.522	4.276	8.798
	KEMUNING	2.223	2.213	4.436
	BOJONG MENTENG	2.376	2.231	4.607
	BOJONG CATANG	3.028	2.811	5.839
	BOJONG PANDAN	3.503	3.288	6.791
	PANCAREGANG	1.337	1.264	2.601
16	BAROS	35.401	33.040	68.441
	BAROS	3.479	3.270	6.749
	TEJAMARI	2.420	2.180	4.600
	PANYIRAPAN	3.578	3.356	6.934
	SIDAMUKTI	2.872	2.804	5.676
	SUKACAI	1.848	1.722	3.570
	TAMANSARI	1.923	1.781	3.704
	SINDANGMANDI	3.378	3.124	6.502
	CISALAM	2.410	2.206	4.616
	SUKAMANAH	3.447	3.234	6.681
	SUKAMENAK	2.150	2.013	4.163
	CURUG AGUNG	1.831	1.710	3.541
	PADASUKA	1.977	1.904	3.881
	SINARMUKTI	1.629	1.502	3.131
	SUKA INDAH	2.459	2.234	4.693
17	CIKEUSAL	44.121	43.094	87.215
	CIKEUSAL	3.197	3.137	6.334
	DAHU	3.198	3.081	6.279
	KATULISAN	1.706	1.676	3.382
	SUKAMAJU	2.493	2.417	4.910
	CILAYANG	2.649	2.552	5.201
	SUKAMENAK	1.910	1.829	3.739
	CIMAUNG	3.298	3.140	6.438
	PANYABRANGAN	3.714	3.523	7.237
	GANDAYASA	3.309	3.237	6.546
	BANTAR PANJANG	1.832	1.728	3.560
	SUKARATU	2.002	2.026	4.028
	HARUNDANG	1.627	1.574	3.201
	SUKARAME	2.562	2.567	5.129
	PANOSOGAN	1.738	1.731	3.469

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	MONGPOK	3.886	3.833	7.719
	SUKARAJA	2.784	2.850	5.634
	CILAYANG GUHA	2.216	2.193	4.409
18	PAMARAYAN	35.528	33.203	68.731
	PAMARAYAN	3.274	3.135	6.409
	DAMPING	3.607	3.354	6.961
	WIRANA	4.384	4.033	8.417
	KEBONCAU	3.492	3.185	6.677
	PUDAR	3.558	3.356	6.914
	BINONG	2.607	2.374	4.981
	SANGIANG	4.165	3.941	8.106
	KAMPUNGBARU	3.827	3.783	7.610
	PASIRLIMUS	4.194	3.805	7.999
	PASIR KEMBANG	2.420	2.237	4.657
19	KOPO	32.175	29.683	61.858
	KOPO	2.307	2.021	4.328
	GARUT	3.447	3.103	6.550
	NANGGUNG	5.053	4.672	9.725
	CIDAHU	3.278	3.119	6.397
	NYOMPOK	3.670	3.363	7.033
	GABUS	4.113	3.862	7.975
	CARENANG UDIK	2.706	2.497	5.203
	RANCASUMUR	3.534	3.222	6.756
	BABAKANJAYA	1.418	1.390	2.808
	MEKARBARU	2.649	2.434	5.083
20	JAWILAN	35.576	33.422	68.998
	JAWILAN	3.516	3.369	6.885
	BOJOT	2.628	2.492	5.120
	CEMPLANG	4.478	4.174	8.652
	PAGINTUNGAN	4.101	3.766	7.867
	PASIRBUYUT	4.157	3.916	8.073
	MAJASARI	4.658	4.273	8.931
	PARAKAN	3.609	3.422	7.031
	KAREO	3.785	3.635	7.420
	JUNTI	4.644	4.375	9.019
21	CIOMAS	26.007	24.175	50.182
	UJUNGTEBU	2.844	2.695	5.539
	SIKETUG	2.006	1.846	3.852
	LEBAK	2.906	2.717	5.623
	PONDOK KAHURU	2.631	2.538	5.169
	SUKABARES	1.947	1.848	3.795
	SUKARENA	2.561	2.233	4.794

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	SUKADANA	3.171	3.044	6.215
	CEMPLANG	1.995	1.830	3.825
	CISITU	1.885	1.794	3.679
	CITAMAN	1.842	1.690	3.532
	PANYAUNGAN JAYA	2.219	1.940	4.159
22	PABUARAN	26.275	24.775	51.050
	PABUARAN	4.069	3.835	7.904
	KADUBEUREUM	3.333	3.194	6.527
	TANJUNGSARI	2.058	1.971	4.029
	PANCANEGARA	3.772	3.560	7.332
	SINDANGSARI	4.987	4.722	9.709
	SINDANGHEULA	4.721	4.485	9.206
	PASANGGRAHAN	2.374	2.174	4.548
	TALAGA WARNA	961	834	1.795
23	PADARINCANG	41.592	39.553	81.145
	PADARINCANG	2.937	2.829	5.766
	BUGEL	2.958	2.835	5.793
	CIBOJONG	2.516	2.419	4.935
	CITASUK	4.710	4.604	9.314
	CISAAT	1.918	1.904	3.822
	CIOMAS	4.124	3.947	8.071
	BARUGBUG	1.694	1.544	3.238
	BATU KUWUNG	4.918	4.482	9.400
	KRAMATLABAN	2.486	2.431	4.917
	KALUMPANG	2.860	2.640	5.500
	KADUBEUREUM	3.232	3.165	6.397
	CIPAYUNG	3.180	2.987	6.167
	CURUG GOONG	2.428	2.286	4.714
	KADU KEMPONG	1.631	1.480	3.111
24	ANYAR	32.896	31.667	64.563
	ANYAR	3.951	3.881	7.832
	SINDANG MANDI	2.461	2.340	4.801
	CIKONENG	3.606	3.407	7.013
	TANJUNG MANIS	1.762	1.667	3.429
	BANDULU	2.933	2.775	5.708
	BUNIHARA	2.612	2.466	5.078
	KOSAMBIRONYOK	2.692	2.675	5.367
	BANJARSARI	2.008	1.878	3.886
	MEKARSARI	3.767	3.712	7.479
	SINDANGKARYA	2.303	2.164	4.467
	TAMBANG AYAM	2.379	2.225	4.604
	GROGOL INDAH	2.422	2.477	4.899

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
25	CINANGKA	34.635	32.934	67.569
	CINANGKA	3.086	2.853	5.939
	BANTARWARU	2.685	2.580	5.265
	PASAURAN	1.754	1.687	3.441
	BULAKAN	2.419	2.330	4.749
	KARANG SURAGA	3.378	3.197	6.575
	UMBUL TANJUNG	2.862	2.638	5.500
	KUBANG BAROS	2.523	2.439	4.962
	RANCASANGGAL	2.201	2.107	4.308
	CIKOLELET	2.784	2.742	5.526
	SINDANGLAYA	3.048	2.896	5.944
	KAMASAN	4.081	3.894	7.975
	BANTARWANGI	1.387	1.295	2.682
	MEKARSARI	1.627	1.530	3.157
	BAROS JAYA	800	746	1.546
26	MANCAK	28.470	26.305	54.775
	MANCAK	2.504	2.334	4.838
	CIWARNA	2.210	1.977	4.187
	ANGSANA	3.102	2.846	5.948
	TALAGA	2.194	2.007	4.201
	CIKEDUNG	1.083	949	2.032
	SIGEDONG	1.750	1.606	3.356
	SANGIANG	1.836	1.683	3.519
	PASIRWARU	1.735	1.498	3.233
	WARINGIN	1.651	1.518	3.169
	WINONG	1.495	1.452	2.947
	BATUKUDA	3.632	3.475	7.107
	LABUAN	2.988	2.797	5.785
	BALE KAMBANG	1.322	1.230	2.552
	BALE KENCANA	968	933	1.901
27	GUNUNGSARI	14.069	13.212	27.281
	GUNUNGSARI	2.605	2.487	5.092
	CIHERANG	2.358	2.188	4.546
	TAMIANG	2.618	2.434	5.052
	SUKALABA	1.599	1.498	3.097
	KADU AGUNG	2.253	2.079	4.332
	LUWUK	1.280	1.257	2.537
	CURUG SULANJANA	1.356	1.269	2.625
28	BANDUNG	22.169	21.531	43.700
	BANDUNG	4.568	4.440	9.008
	MANDER	3.190	3.095	6.285
	PANAMPING	3.046	2.954	6.000
	PANGAWINAN	2.390	2.282	4.672

NO	WILAYAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
	MALABAR	1.736	1.744	3.480
	BLOKANG	2.865	2.809	5.674
	BABAKAN	1.955	1.901	3.856
	PRINGWULUNG	2.419	2.306	4.725
29	LEBAK WANGI	22.144	21.839	43.983
	KAMARUTON	1.870	1.750	3.620
	TERAS BENDUNG	2.690	2.568	5.258
	LEBAK WANGI	1.656	1.582	3.238
	LEBAK KEPUH	1.425	1.405	2.830
	KENCANA HARAPAN	1.859	1.837	3.696
	PEGANDIKAN	1.895	1.939	3.834
	PURWADADI	2.980	3.027	6.007
	BOLANG	2.150	2.139	4.289
	TIREM	3.015	3.003	6.018
	KEBONRATU	2.604	2.589	5.193
	JUMLAH	936.721	899.356	1.836.077

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2025

Berdasarkan data diketahui bahwa Kecamatan yang memiliki desa terbanyak adalah Kecamatan Cikeusal sebanyak 17 Desa dan Kecamatan dengan desa yang paling Sedikit dalam satu kecamatan berjumlah 7 desa berada di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Gunungsari.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Serang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 beberapa kali diubah dan terakhir diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di Kabupaten Serang, sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Perangkat daerah yang dibentuk merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan

Berikut tabel di bawah ini yang menjelaskan rincian Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang dengan tipe perangkat daerah yang didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja urusan pemerintahan disertai unit kerja perangkat daerah berdasarkan Dasar Hukum pembentuknya

Tabel 6. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 beberapa kali diubah dan terakhir diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		
1	Sekretariat Daerah	Type A
	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peraturan Bupati Serang Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Serang
	- Bagian Tata Pemerintahan	
	- Bagian Hukum	
	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
	- Bagian Perekonomian dan SDA	
	- Bagian Administrasi Pembangunan	
	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
	Asisten Bidang Administrasi Umum	
	- Bagian Umum	
	- Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	
	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
	- Bagian Perencanaan dan Keuangan	
2	Sekretariat DPRD	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
	Bagian Umum	
	Bagian Keuangan	
	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	
	Bagian Hubungan Masyarakat	
3	Inspektorat	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang
	Inspektur Pembantu Wilayah I	
	Inspektur Pembantu Wilayah II	
	Inspektur Pembantu Wilayah III	
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	
	Inspektur Pembantu Wilayah V	
4	Dinas Kesehatan	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
	Bidang Pelayanan Kesehatan	
	Bidang Kesehatan Masyarakat	
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	Bidang Sarana, Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	
	Unit Pelaksana Teknis.	
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan	
	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	
	Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
	Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	Bidang Kebudayaan.	
	Unit Pelaksana Teknis Fungsional.	
6	Dinas Sosial	Type A

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Serang
	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	Bidang Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana	
	Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Fasilitas Penanganan Fakir Miskin	
	Unit Pelaksana Teknis.	Peraturan Bupati Serang Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Sekretariat	
	Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	
	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	Unit Pelaksana Teknis.	Peraturan Bupati Serang Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Sekretariat	
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peraturan Bupati Serang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
	Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
9	Dinas Perhubungan	
	Sekretariat	
	Bidang Lalu Lintas Jalan	Peraturan Bupati Serang Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang
	Bidang Angkutan Jalan	
	Bidang Keselamatan Jalan	
	Bidang Pelayaran dan Penerbangan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Bupati Serang Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang
	Sekretariat	
	Bidang Koperasi	
	Bidang Usaha Mikro	
	Bidang Perindustrian	
	Bidang Perdagangan	Peraturan Bupati Serang Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang
	Unit Pelaksana Teknis.	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Sekretariat	
	Bidang Pemerintahan Desa	
	Bidang Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa	Peraturan Bupati Serang Nomor 92 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang
	Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	
	Bidang Pemberdayaan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	
	Bidang Keluarga Berencana	
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	
	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Unit Pelaksana Teknis.	Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
13	Dinas Lingkungan Hidup	
	Sekretariat	
	Bidang Perencanaan dan Penataan Lingkungan Hidup	
	Bidang Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
	Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang
	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
	Unit Pelaksana Teknis.	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	Sekretariat	
	Pelayanan Penanaman Modal	
	Pengawasan dan Pengendalian	
	Perizinan	
	Non Perizinan	

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Unit Pelaksana Teknis.	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Type A
	Sekretariat	
	Bidang Bina Marga	
	Bidang Sumber Daya Air	
	Bidang Sanitasi dan Air Minum	
	Bidang Tata Ruang	
	Bidang Bina Konstruksi	
	Bidang Penataan Bangunan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Type A
	Sekretariat	
	Bidang Ketahanan Pangan	
	Bidang Sarana Pertanian	
	Bidang Prasarana Pertanian	
	Bidang Penanggulangan Bencana dan Pembinaan Usaha Pertanian	
	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	Bidang Penyuluhan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Type A
	Sekretariat	
	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
	Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika	
	Bidang Persandian dan Data Statistik	
	Unit Pelaksana Teknis.	
18	Dinas Perikanan	Type B
	Sekretariat	
	Bidang Perikanan Tangkap	
	Bidang Perikanan Budidaya	
	Bidang Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan Dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Type B
	Sekretariat	
	Bidang pemuda dan olahraga	
	Bidang peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	
	Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Unit Pelaksana Teknis.	
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Type B
	Sekretariat	
	Bidang Perumahan	
	Bidang Kawasan Permukiman	
	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
	Unit Pelaksana Teknis.	
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Type B
	Sekretariat	
	Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	
	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	
	Bidang Kearsipan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Type B
	Sekretariat	
	Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah	
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	
	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pemberdayaan Linmas	
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Type A
	Sekretariat	
	Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

No.	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	
	Unit Pelaksana Teknis.	
24	Badan Pendapatan Daerah	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang
	Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	
	Bidang Penyuluhan, Data dan Informasi	
	Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan	
	Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pemeriksaan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang
	Bidang Anggaran	
	Bidang Perbendaharaan	
	Bidang Akuntansi	
	Bidang Aset Daerah	
	Unit Pelaksana Teknis.	
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	Type B
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Serang
	Bidang Pengadaan, Data dan Pemberhentian	
	Bidang Promosi, Mutasi dan Pembinaan ASN	
	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Unit Pelaksana Teknis.	
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Intensitas Sedang
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serang
	Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama	
	Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.	
	Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik	
	Unit Pelaksana Teknis.	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Serang
	Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan	
	Bidang penanganan darurat	
	Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	
	Bidang kebakaran	
	Unit Pelaksana Teknis.	
29	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	
	Direktur	Peraturan Bupati Serang Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara Kabupaten Serang
	Wakil Direktur Pelayanan	
	Wakil Direktur Penunjang	
	Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan	
	Unit Pelaksana Teknis.	
30	29 Kecamatan	Type A
	Sekretariat	Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan di Kabupaten Serang
	- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	
	- Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Evaluasi.	
	- Kepala Seksi Tata Pemerintahan	
	- Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.	
	- Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan	
	- Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.	
	- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Sumber : Pemerintah Kabupaten Serang

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Serang merupakan pegawai Kabupaten Serang yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

dan disertai tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya.

Berikut jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.

Tabel 7. Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Kesekretariatan Daerah, Perencanaan Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat, Perekonomiandan Sda, Adminstrasi, PBJ, Keumuman, Organisasi Dan RB, Protokol Dan Komunikasi Pimpinan serta Perencanaan Dan Keuangan	21	42	87	150
2	Sekretariat DPRD	Kesekretariatan DPRD	9	8	15	32
3	Inspektorat	Pengawasan	8	67	11	86
4	Dinas Kesehatan	Bidang Kesehatan	16	1067	82	1165
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan	16	5825	178	6019
6	Dinas Sosial	Bidang Sosial	8	9	15	32
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi	7	14	22	43
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Kependudukan Pencatatan Sipil	35	12	18	65
9	Dinas Perhubungan	Bidang Perhubungan	17	10	39	66
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	11	17	24	52
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	15	14	36
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bidang Keluarga Berencana, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak	12	12	20	44
13	Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Lingkungan Hidup	12	14	62	88
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bidang Penanaman Modal	3	18	23	44
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32	40	133	205
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bidang Pangan dan Bidang Pertanian	13	18	29	60

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian	7	9	14	30
18	Dinas Perikanan	Bidang Perikanan	12	11	18	41
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Bidang Pariwisata	6	10	10	26
20	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7	8	25	40
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	6	9	9	24
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum	13	15	34	62
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan	9	16	23	48
24	Badan Pendapatan Daerah	Bidang Keuangan	17	7	53	77
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	15	6	29	50
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian dan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	6	10	23	39
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemerintahan Umum dan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	4	7	11	22
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana dan Urusan Kebakaran	9	12	31	52
29	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Bidang Pelayanan Kesehatan	9	592	141	742
30	Kecamatan Kramatwatu	Kewilayahan	9	1	22	32
31	Kecamatan Waringin Kurung	Kewilayahan	9	1	5	15
32	Kecamatan Bojonegara	Kewilayahan	9	1	7	17
33	Kecamatan Pulo Ampel	Kewilayahan	9	1	4	14
34	Kecamatan Ciruas	Kewilayahan	9	1	18	28
35	Kecamatan Kragilan	Kewilayahan	9	0	21	30
36	Kecamatan Pontang	Kewilayahan	8	1	9	18
37	Kecamatan Tirtayasa	Kewilayahan	8	0	7	15
38	Kecamatan Tanara	Kewilayahan	9	1	2	12

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
39	Kecamatan Cikande	Kewilayahan	9	1	11	21
40	Kecamatan Kibin	Kewilayahan	9	0	14	23
41	Kecamatan Carenang	Kewilayahan	9	0	5	14
42	Kecamatan Binuang	Kewilayahan	8	1	4	13
43	Kecamatan Petir	Kewilayahan	8	1	6	15
44	Kecamatan Tunjung Teja	Kewilayahan	9	0	3	12
45	Kecamatan Baros	Kewilayahan	9	1	7	17
46	Kecamatan Cikeusal	Kewilayahan	5	1	4	10
47	Kecamatan Pamarayan	Kewilayahan	7	0	5	12
48	Kecamatan Bandung	Kewilayahan	9	0	6	15
49	Kecamatan Kopo	Kewilayahan	9	1	9	19
50	Kecamatan Jawilan	Kewilayahan	9	0	6	15
51	Kecamatan Ciomas	Kewilayahan	9	0	6	15
52	Kecamatan Pabuaran	Kewilayahan	7	1	3	11
53	Kecamatan Gunungsari	Kewilayahan	8	1	6	15
54	Kecamatan Padarincang	Kewilayahan	7	0	4	11
55	Kecamatan Anyer	Kewilayahan	9	0	9	18
56	Kecamatan Mancak	Kewilayahan	9	1	7	17
57	Kecamatan Cinangka	Kewilayahan	8	1	5	14
58	Kecamatan Lebak Wangi	Kewilayahan	8	0	7	15
Jumlah			591	7917	1415	9923

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Serang

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang di Tahun 2025 dikarenakan pada dasarnya kinerja pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berikut ini diuraikan lebih rinci anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Serang pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	%
1	2	3	4
PENDAPATAN DAERAH	3.533.969.684.293,00	3.588.090.358.285,00	98,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.105.550.595.638,00	1.097.550.142.214,00	100,72
Pajak Daerah	736.179.846.949,00	725.174.381.504,00	101,51
Retribusi Daerah	270.387.639.630,00	252.142.584.022,00	107,23
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.905.083.376,00	18.932.083.377,00	99,85
Lain-lain PAD yang Sah	80.078.025.683,00	101.301.093.311,00	79,04
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.105.550.595.638,00	1.097.550.142.214,00	100,72

URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	%
1	2	3	4
PENDAPATAN TRANSFER	2.414.003.256.862,00	2.476.501.530.950,00	97,47
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.226.197.854.318,00	2.272.975.539.889,00	97,94
Pendapatan Transfer Antar Daerah	187.805.402.544,00	203.525.991.061,00	92,27
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	187.805.402.544,00	203.525.991.061,00	92,27
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	2.414.003.256.862,00	2.476.501.530.950,00	97,47
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.415.831.793,00	14.038.685.121,00	102,68
Pendapatan Hibah	11.802.146.672,00	11.425.000.000,00	103,30
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.613.685.121,00	2.613.685.121,00	100,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.415.831.793,00	14.038.685.121,00	102,68
JUMLAH PENDAPATAN	3.533.969.684.293,00	3.588.090.358.285,00	98,49
BELANJA DAERAH	3.438.456.533.241,00	3.615.967.850.057,00	95,09
BELANJA OPERASI	2.674.018.508.144,00	2.787.040.489.327,00	95,94
Belanja Pegawai	1.510.133.055.349,00	1.550.446.482.475,42	97,39
Belanja Barang dan Jasa	1.015.231.330.228,00	1.087.345.292.460,58	93,36
Belanja Bunga	306.250.000,00	306.250.000,00	100,00
Belanja Hibah	138.265.199.207,00	138.849.469.791,00	99,57
Belanja Bantuan Sosial	10.082.673.360,00	10.092.994.600,00	99,89
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.674.018.508.144,00	2.787.040.489.327,00	95,94
BELANJA MODAL	239.311.625.543,00	262.549.906.930,00	91,14
Belanja Modal Tanah	2.438.830.876,00	12.497.880.760,00	19,51
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.131.047.995,00	160.179.695.669,00	96,22
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.666.670.093,00	42.453.296.361,00	93,43
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.956.401.229,00	25.508.585.933,00	86,07
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.622.500.950,00	21.237.848.207,00	97,10
Belanja Modal Aset Lainnya	496.174.400,00	672.600.000,00	73,76
JUMLAH BELANJA MODAL	239.311.625.543,00	262.549.906.930,00	91,14
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.498.559.326,00	11.695.194.400,00	21,36
Belanja Tidak Terduga	2.498.559.326,00	11.695.194.400,00	21,36
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	2.498.559.326,00	11.695.194.400,00	21,36
BELANJA TRANSFER	522.627.840.228,00	554.682.259.400,00	94,22
Belanja Bagi Hasil	76.871.952.400,00	77.164.700.400,00	99,62
Belanja Bantuan Keuangan	445.755.887.828,00	477.517.559.000,00	93,34
JUMLAH BELANJA TRANSFER	522.627.840.228,00	554.682.259.400,00	94,22
JUMLAH BELANJA	3.438.456.533.241,00	3.615.967.850.057,00	95,09
SURPLUS/DEFISIT	95.513.151.052,00	(27.877.491.772,00)	(342,61)
PEMBIAYAAN DAERAH	27.849.821.961,00	27.877.491.772,00	99,90
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.849.821.961,00	65.877.491.772,00	99,95
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.849.821.961,00	30.877.491.772,00	99,91
Penerimaan Pinjaman Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.849.821.961,00	65.877.491.772,00	99,95
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	27.849.821.961,00	27.877.491.772,00	99,90

URAIAN	REALISASI	ANGGARAN	%
1	2	3	4
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	123.362.973.013,00	0,00	0,00

Sumber data: BPKAD (LRA Kab. Serang Tahun 2025 - unaudited)

Realisasi pendapatan daerah terhadap target anggaran Kabupaten Serang pada tahun 2025 mencapai 98,49%. Jika dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total realisasi Pendapatan Daerah, maka Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2025 sebesar 31,28%. Meski demikian, capaian realisasi pendapatan asli daerah terhadap target yang telah ditetapkan menunjukkan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100,72%.

Realisasi belanja daerah terhadap target anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar 95,09% atau sebesar Rp 3,4 Triliun. Komposisi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar 77,77% terhadap realisasi belanja. Sedangkan proporsi terbesar dari belanja operasi adalah realisasi belanja pegawai yakni sebesar 56,47%.

Pembiayaan netto sebesar Rp 27,8 Miliar dengan realisasi Surplus tahun anggaran 2025 sebesar Rp 95,5 Miliar sehingga realisasi Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenan menjadi Rp 123,3 Miliar.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

1. Permasalahan Pembangunan

Masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan daerah di Kabupaten Serang hasil pemetaan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan di Kabupaten Serang Tahun 2025-2030 antara lain:

Tabel 9. Pemetaan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Serang

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dan berdaya saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan masih perlu ditingkatkan	
	1. Masih rendahnya tingkat intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	- Masih rendahnya minat baca siswa dan kualitas pembelajaran matematika belum optimal, serta sarana dan prasarana pendukung masih kurang memadai - Terbatasnya akses terhadap pendidikan yang merata dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi ekonomi dan geografis yang kurang mendukung - Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial budaya, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan
	2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat	Pelayanan Antenatal Care (ANC) terpadu masih belum optimal, serta masih terdapat kasus ibu melahirkan yang tidak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
		- Koordinasi lintas sektor di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten dalam upaya menurunkan prevalensi stunting masih belum optimal - Ketersediaan alat diagnosis Tes Cepat Molekuler (TCM) untuk mendeteksi Tuberkulosis (TB) masih terbatas di Puskesmas dan Rumah Sakit serta belum optimalnya sistem pelaporan - Belum optimalnya penginputan data keluarga sehat dalam aplikasi yang digunakan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi aktual di masyarakat
3.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan	- Belum terpenuhinya sarpras sesuai standar Kemenkes - Belum terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar Kemenkes sebagai rumah sakit pengampunan dan mitra JKN - Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan rumah sakit - Belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia baik kuantitas, kualitas, dan distribusi - Belum optimalnya digitalisasi informasi dan manajemen rumah sakit
4.	Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap pola asuh anak, kepesertaan remaja dalam PIKR dan belum optimalnya peran GenRe di masyarakat - Masih rendahnya kemandirian ekonomi keluarga - Adanya permasalahan sosial dalam rumah tangga, lemahnya hubungan antar anggota keluarga, kurang akuratnya data keluarga, serta minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga
5.	Belum optimalnya Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	- Pelayanan kesehatan reproduksi yang disosialisasikan belum menjangkau seluruh wilayah. - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB belum optimal. - Masih kurangnya edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan sehingga pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga tidak optimal. - Masih rendahnya jumlah kader KB yang berkualitas (Pos Kb dan sub Pos KB Desa) - Belum optimalnya kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
6.	Data terkait angka Kelahiran total yang tidak sama antara pusat dan daerah	- Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah - Pemetaan pengendalian penduduk cakupan daerah belum optimal
7.	Cakupan kepesertaan MKJP masih rendah dan unmetneed yg msh tinggi	- Penyampaian informasi bangga kencana belum optimal - Rasa takut terhadap alat kontrasepsi modern terutama MKJP
8.	Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	- Minimnya akses pemuda terhadap pendidikan karakter dan kepemimpinan - Belum tersedia pusat pengembangan olahraga berupa sport center yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemusatan pelatihan bagi atlet dan cabang olahraga
9.	Masih rendahnya literasi masyarakat	Urusan perpustakaan masih belum mendapatkan prioritas yang memadai dalam pengembangan sumber daya manusia

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
	10. Masih rendahnya Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang inklusif	• PPKS yang tertangani belum berjalan optimal • Masih kurangnya jumlah Pekerja Sosial dalam menangani masalah kesejahteraan sosial • Masih terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial • Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat • Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial di masyarakat • Belum menguatnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat. • Koordinasi lintas bidang dalam penanganan masalah kesejahteraan masih belum optimal • Belum adanya rumah singgah sebagai shelter bagi PPKS yang terlantar • Belum Optimalnya peran dari lembaga lembaga sosial (PSKS), Stake Holder Terkait dan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yang menjadi perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial
	11. Belum optimalnya pembangunan yang responsif gender (Pengarutamaan gender) dan Pemenuhan hak anak (PUHA)	• Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan. • Masih rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik. • Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan (responsif gender) • Belum optimalnya OPD dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) • Belum optimalnya tata kelola kelembagaan perlindungan anak, yang ditandai dengan terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemanfaatan data terpilah anak sebagai dasar perencanaan dan intervensi pembangunan. • Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak • Minimnya data terpilah untuk mengidentifikasi kelompok Perempuan rentan • Masih kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak
	12. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen	• Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin Perempuan
	13. Kurang optimalnya peran serta organisasi masyarakat terhadap pembangunan gender	• Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi Perempuan • Kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan • Kurangnya kepedulian keluarga terhadap kualitas hidup lansia
	14. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan Anak	• Belum adanya komitmen kerja sama yang kuat dan sinergis antara semua pihak yang terkait • Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan kurang memberikan efek jera

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
	15. Belum optimalnya pemenuhan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Keterbatasan dan ketidaklengkapan data perumahan
2	Belum Optimalnya kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah	
	1. Rendahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur yang layak dan berkualitas	Kurangnya perencanaan terintegrasi dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur fisik yang memadai
	2. Belum optimalnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Keterbatasan infrastruktur transportasi publik (halte, terminal, jalan akses)
	3. Belum optimalnya daya saing industri	Infrastruktur pendukung industri belum memadai
	4. Masih rendahnya nilai tambah perdagangan	Lemahnya perencanaan terintegrasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur yang mendukung perdagangan
	5. Masih rendahnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Infrastruktur transportasi yang belum memadai menghambat distribusi produk UMKM ke masyarakat
	6. Masih rendahnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Infrastruktur pendukung pariwisata (akses jalan, fasilitas umum, transportasi) belum memadai
3	Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan masih perlu ditingkatkan	
	1. Belum optimalnya peningkatan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kebutuhan sektor produktif berbasis potensi lokal
	2. Masih lemahnya daya tarik iklim investasi	Rendahnya kapasitas pelaku usaha lokal
	3. Masih Rendahnya Prosentase Desa Maju dan Mandiri berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM)	- Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa belum memadai - Masih rendahnya Peran aktif masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan - Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat - Rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola potensi yang ada
	4. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri
	5. Belum optimalnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	Ketersediaan anggota Satpol PP belum memadai untuk pengamanan di seluruh wilayah
	6. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai pentingnya pencegahan serta mitigasi terhadap kawasan rawan bencana	Wilayah geografis Kabupaten Serang cukup luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sehingga sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kepada masyarakat belum merata
4	Kabupaten Serang pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan	
	1. Masih rendahnya kesejahteraan petani	Rendahnya kapasitas dan keterampilan petani serta lemahnya kelembagaan
	2. Belum optimalnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Produktivitas lahan masih rendah akibat teknologi dan sarana produksi terbatas
	3. Masih rendahnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pelestarian ekosistem lamun serta akses modal yang sulit dan minimnya lembaga keuangan mikro yang menjangkau nelayan

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
		Pencemaran limbah tidak terkelola dan minimnya akses teknologi budidaya modern
5	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima masih perlu ditingkatkan	
1.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penegakan integritas aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas
2.	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas yang masih terbatas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai
3.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Kurangnya kapasitas SDM, rendahnya integrasi sistem informasi, serta belum memadainya data dan pengukuran kinerja pembangunan secara akuntabel
4.	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	- Belum optimalnya pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD Keuangan - Belum optimalnya sistem pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi - Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah
5.	Belum optimalnya tingkat profesionalitas ASN	Belum optimalnya sistem manajemen kepegawaian
6.	Belum optimalnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Belum tersedianya pusat data (data center) daerah
7.	Masih rentannya keamanan informasi Pemerintah Daerah	Belum adanya legalitas dan sistem keamanan yang mengatur penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
8.	Masih rendahnya tata kelola arsip	Masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan arsip
9.	Belum optimalnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif	- Masih ada penduduk Kabupaten Serang yang belum terdaftar dalam database kependudukan - Masih tidak sesuai data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, Akta Kelahiran serta data berbagai lintas instansi seperti BPJS Kesehatan, perbankan dan lain-lain. - Pengendalian mobilitas penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian penduduk non permanen dan pengendalian mobilitas kependudukan orang asing. - Masih rendahnya cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian.
10.	Masih rendahnya tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik di Kecamatan	Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan yang masih terbatas dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
11.	Belum optimalnya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Masih terbatasnya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi dan dapat diakses publik
12.	Masih rendahnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Belum adanya regulasi terkait riset dan inovasi
13.	Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD masih terbatas
6.	Kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang masih perlu ditingkatkan	

No.	Masalah Pokok/Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya aktualisasi nilai-nilai agama dan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat	• Belum optimalnya sosialisasi regulasi terkait kerukunan umat beragama oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
2.	Belum optimalnya kemajuan dalam bidang kebudayaan	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian kebudayaan dan minimnya sarana dan prasarana pendukung

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang 2025-2030

2. Permasalahan Strategis Pemerintah

Permasalahan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai "kesenjangan" atau "gap" antara kondisi ideal yang diinginkan dan kondisi riil yang ada saat ini. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan. Perspektif lain menjelaskan bahwa mandatori pembangunan sesuai lingkungan dinamis dari pemerintah pusat maupun lingkungan global menjadi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang ini disebut isu strategis. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal.

Perumusan isu strategis mendasarkan pada isu RPJPD Kabupaten Serang 2025-2045 Tahap I, isu dalam RPJMN 2025–2029, RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, isu dalam RPJMD Provinsi Banten 2025-2029, tantangan Global, KLHS RPJMD Kabupaten Serang tahun 2025-2029, dan potensi daerah, dipadukan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Berikut adalah isu strategis di Kabupaten Serang:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter unggul, kreatif, berdaya saing, dan sejahtera.
2. Penataan infrastruktur wilayah kabupaten yang aman dan nyaman, tangguh dan berketahanan ekonomi.
3. Pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan serta penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif.
4. Tata kelola pemerintahan yang bersih, gesit, kolaboratif dan inovatif.
5. Pemenuhan hak dasar masyarakat secara inklusif dan pembangunan wilayah kabupaten yang kondusif berlandaskan nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kabupaten Serang

Visi pembangunan dapat diterjemahkan sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi akan menjadi landasan utama dalam memilih dan menetapkan misi, strategi, arah kebijakan, maupun rencana program pembangunan di suatu daerah guna mencapai tujuan atau target yang diinginkan tersebut. Dalam kerangka pembangunan daerah, visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diajukan pada saat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang terpilih periode 2025-2029 mengusung

VISI :

“Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia”

Visi di atas didasari hasil telaahan dan kajian yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang menjelaskan bahwa “Tingkat kesejahteraan masyarakat dan lingkungan yang nyaman menuju Kabupaten Serang bahagia masih belum optimal” sehingga menjadi atensi yang serius untuk diselesaikan.

2. Misi Kabupaten Serang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten

Serang untuk mewujudkan visi daerah. Dalam kerangka pembangunan, misi adalah langkah-langkah konkret yang dirumuskan untuk mencapai visi. Terdapat kesinambungan yang jelas antara misi-misi pada RPJMN (Nasional), RPJMD Provinsi Banten, dan RPJMD Kabupaten Serang untuk periode 2025-2029. Misi pada setiap tingkatan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi yang lebih besar, menciptakan sebuah rantai perencanaan yang terintegrasi. Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Serang adalah:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang Unggul, Sejahtera dan Berdaya Saing dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan pemberdayaan perempuan.

Misi 2: Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Misi 3: Mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.

Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Misi 5: Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima.

Misi 6: Mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

1. Program Prioritas

Program Prioritas Daerah yang disusun dalam kerangka RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sebagai jawaban terhadap isu permasalahan strategis, juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya. Adapun program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

2. Program Pembangunan

Program pembangunan adalah serangkaian upaya terencana, bertahap, dan berkesinambungan untuk menciptakan perubahan positif yang meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kapasitas suatu wilayah atau masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan SDM melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi yang terintegrasi.

Program pembangunan juga dapat diartikan rencana aksi terstruktur untuk mencapai tujuan pembangunan, mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan masa kini dan mendatang. Rencana program Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 sebagai berikut :

Tabel 10. Indikatif Program Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1. Angka Partisipasi Sekolah usia 5-6 dalam PAUD	%	
	2. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-15 dalam Pendidikan Dasar	%	
	3. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-18 dalam Pendidikan kesetaraan	%	
Meningkatnya kualitas hasil belajar Peserta Didik	4. Skor Kemampuan Literasi SD	%	
	5. Skor Kemampuan Literasi SMP	%	
	6. Skor Kemampuan Numerasi SD	%	
	7. Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	
Meningkatnya Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan Minimal Akreditasi B	8. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	
Meningkatnya Jumlah Pendidik PAUD dengan kualifikasi S1/D4	9. Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	%	
Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Dasar	10. Nilai Inklusivitas SD	%	
	11. Nilai Inklusivitas SMP	%	
Meningkatnya Keamanan di lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12. Nilai Iklim Keamanan SD	%	
	13. Nilai Iklim Keamanan SMP	%	
Meningkatnya proses pembelajaran SD yang mendukung toleransi agama, budaya dan komitmen kebangsaan	14. Nilai Iklim Kebinekaan SD	%	
	15. Nilai Iklim Kebinekaan SMP	%	
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru PAUD	poin	
	2. Indeks Pemerataan Guru SD	poin	
	3. Indeks Pemerataan Guru SMP	poin	
	4. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD	%	
	5. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	%	
	6. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	%	
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbaharui	%	
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			PD Pengampu Urusan Pendidikan dan Kebudayaan
<i>Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah</i>	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	%	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	DINKES
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	DINKES
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan	Tingkat Penerimaan Pendapatan Puskesmas	%	DINKES
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	
	2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	
	3. Angka Kematian Balita (AKBa)	Per 1.000 KH	
	4. Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	
	5. Cakupan Penemuan Tuberkulosis	%	
	6. Persentase pasien tuberkulosis sensitif obat yang memulai pengobatan	%	
	7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	
	8. Persentase Desa Stop BABS	%	
	9. Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	%	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas dan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			PD Pengampu Urusan Kesehatan (DINKES)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSDP)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Rumah Sakit	Cost Recovery Rate (CRR)	%	
	Return Of Investment	%	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PD Pengampu Urusan Kesehatan (RSDP)
Tercapainya Indikator Pelayanan Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	
	Length of stay (LOS)	Hari	
	Bed Turn Over (BTO)	Kali	
	Turn Over Interval (TOI)	Hari	
	Angka Kematian bersih (NDR)	Orang	
	Angka Kematian Kasar (GDR)	Orang	
	ERTR (Emergency Response Time Rate)	Menit	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	
	2. Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	%	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/ TPST Regional	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya persentase penataan bangunan dan lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik	%	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			PD Pengampu Urusan PUPR
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tingkat Pemanfaatan Inforasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGA N PERUMAHAN			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	
	2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	%	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Terpenuhinya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dan sudah diserahkan dengan kondisi baik	%	
1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			PD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas (SATPOL PP) / PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas (BPBD)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	
terhadap Perda dan Perkada			
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULAN GAN BENCANA			PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PD Pengampu Urusan Trantibum Linmas
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi Edukasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1. Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang	
	2. Perentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	%	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	
	2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	
	4. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	
	6. Indeks Kesejahteraan Sosial	Poin	
	7. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Poin	
	8. Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Poin	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			PD Pengampu Urusan Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	
	2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	
	3. Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	
	6. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	
	2. Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	
	3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			PD Pengampu Urusan Sosial
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	%	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Peningkatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	%	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak- Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Perusahaan	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	
	2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (per 100.000 penduduk perempuan)	%	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesenjangan Gender, Pemenuhan Hak, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan infrastruktur lumbung pangan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			PD Pengampu Urusan Pertanahan
Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			PD Pengampu Urusan Pangan
Meningkatnya Ketersediaan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah Daerah	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan yang Diselesaikan Tepat Waktu	%	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	
	Indeks Kualitas Udara	Angka	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA MAN HAYATI (KEHATI)			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penanganan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 terkelola	%	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Ligmungan, Izin PPLH, dan PUU LH	%	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan yang ditingkatkan kompetensinya	%	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata Kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	
	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas	%	
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	
	2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	
	3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	
	4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Efektifitas Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	
	2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Umum Adat dalam Pembangunan	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR 15-19)	%	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	%	
	2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SaKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	1. Konektivitas Darat	%	
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut	%	
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	%	
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			PD Pengampu Urusan Perhubungan
Meningkatnya Pengelolaan Perlindungan Kereta Api	Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	%	
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Angka	
	Indeks Pemerintah Digital (PEMDI)	Nilai	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			PD Pengampu Urusan
Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	
	2. Pertumbuhan Wirausaha	%	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			PD Pengampu Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UMKM yang menjalin kemitraan	%	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Instansi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi		
	1. PMA	Rp (Trilyun)	
	2. PMDN	Rp (Trilyun)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			PD Pengampu Urusan Statistik
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Point	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			PD Pengampu Urusan Persandian
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL			PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	%	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			PD Pengampu Urusan Kebudayaan
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	
	2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak benda yang Ditetapkan	%	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai SKM Perangkat Daerah	Nilai	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	Persentase	
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			PD Pengampu Urusan Perpustakaan
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			PD Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya ketersediaan arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		%	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	%	
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		%	PD Pengampu Urusan Kearsipan
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di perairan Umum Daratan	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	%	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Thn	
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	%	
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			PD Pengampu Urusan Pariwisata
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
	- Produksi Padi	Ton	
	- Produksi Jagung	Ton	
	Peningkatan Produksi Hortikultura		
	- Produksi Cabai Besar	Kuintal	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
	- Produksi Bawang Merah	Kuintal	
	- Produksi Buah- buahan	Kuintal	
	Peningkatan Produksi Perkebunan		
	- Produksi Kelapa (Ton)	Ton	
	- Produksi Kopi (Ton)	Ton	
	- Produksi Cengkeh (Ton)	Ton	
	- Produksi Lada (Ton)	Ton	
	Peningkatan Populasi Komoditas Peternakan		
- Populasi Sapi	Ekor		
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	
	2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veterinar)	%	
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	
	2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya usaha pertanian yang terbina	Usaha Pertanian Terbina	Unit Usaha	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			PD Pengampu Urusan Pertanian
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	
	2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	%	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase izin Usaha Perdagangan yang Difalisitasi	%	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangann yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			PD Pengampu Urusan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Meningkatnya	Persentase Stabilitas Harga	%	
Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor	Nilai Ekspor Barang	Juta USD	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			PD Pengampu Urusan Perdagangan
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan	%	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			PD Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			PD Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Kualias Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	%	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			PD Pengampu Urusan Perindustrian
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			PD Pengampu Urusan Transmigrasi
Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang Dibina dan Diberdayakan	%	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Tingkat Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah	Nilai	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Nilai	
Meningkatnya layanan pendukung urusan program penunjang	Tingkat capaian layanan urusan program penunjang	%	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai LPPD	Nilai	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Nilai Indeks Reformasi Hukum	Nilai	
Meningkatnya Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan pemerintah daerah	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	
Meningkatnya layanan pendukung urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Tingkat capaian layanan urusan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	
4.02 SEKRETARIAT DPRD			
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Setwan
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Setwan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	DPRD
	2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	DPRD
5.01 PERENCANAAN			
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	
	2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			PD Pengampu Urusan Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	Bidang Renbang PPM
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Bidang Renbang PSDA
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	Bidang PPIK
5.02 KEUANGAN			
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
			PD Pengampu Urusan Perencanaan (Bapenda)
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BPKAD
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	BPKAD
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BAPENDA
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	BAPENDA
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	
	2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	
	2. Persentase Penurunan SILPA	%	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			PD Pengampu Urusan Perencanaan (BPKAD)
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			PD Pengampu Urusan Perencanaan (Bapenda)
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	BAPENDA
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	BAPENDA
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	%	BAPENDA
5.03 KEPEGAWAIAN			
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			PD Pengampu Urusan Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang Sesuai dengan Formasi	%	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			PD Pengampu Urusan DIKLAT
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	%	
Meningkatnya Kualitas Analisis Kebutuhan, Perancang, Pengembangan dan Evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	%	
Meningkatnya Layanan Penjaminan Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar serta Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			PD Pengampu Urusan LITBANG
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	%	
Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	%	
5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			PD Pengampu Urusan LITBANG
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	%	
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Riset dan Inovasi di Daerah	%	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG			INSPEKTORAT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			INSPEKTORAT
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, Baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Prosentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	%	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			INSPEKTORAT
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	SKOR	
	2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	SKOR	
7.01 KECAMATAN			
1. KECAMATAN ANYAR			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kecamatan Anyar
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Kecamatan Anyar
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kecamatan Anyar
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Anyar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	Kecamatan Anyar
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Anyar
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	Kecamatan Anyar
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Anyar
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	Kecamatan Anyar
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Anyar
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	Kecamatan Anyar
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Anyar
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	Kecamatan Anyar
2. KECAMATAN BANDUNG			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Kecamatan Bandung
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Kecamatan Bandung
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	Kecamatan Bandung
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kecamatan Bandung
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	Kecamatan Bandung
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kecamatan Bandung
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	Kecamatan Bandung
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Bandung
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	Kecamatan Bandung
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Kecamatan Bandung
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	Kecamatan Bandung
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kecamatan Bandung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	Kecamatan Bandung
3. KECAMATAN BAROS			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
4. KECAMATAN BINUANG			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
5. KECAMATAN BOJONEGARA			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
6. KECAMATAN CARENANG			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
7. KECAMATAN CIKANDE			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
8. KECAMATAN CIKEUSAL			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
9. KECAMATAN CINANGKA			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
10. KECAMATAN CIOMAS			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
11. KECAMATAN CIRUAS			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
12. KECAMATAN GUNUNGSARI			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
13. KECAMATAN LEBAKWANGI			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
14. KECAMATAN JAWILAN			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
15. KECAMATAN KIBIN			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
16. KECAMATAN KOPO			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
17. KECAMATAN KRAGILAN			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
18. KECAMATAN KRAMATWATU			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
19. KECAMATAN MANCAK			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
20. KECAMATAN PABUARAN			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
21. KECAMATAN PADARINCANG			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
22. KECAMATAN PAMARAYAN			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
23. KECAMATAN PETIR			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
24. KECAMATAN PONTANG			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
25. KECAMATAN PULOAMPEL			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
26. KECAMATAN TANARA			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
27. KECAMATAN TIRTAYASA			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
28. KECAMATAN TUNJUNGTEJA			
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Nilai	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Meningkatnya Pelayanan Sesuai Pelimpahan Wewenang	Persentase Pelayanan Sesuai Pelimpahan yang Dilaksanakan	%	
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Meningkatnya Keterampilan dan Wawasan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Terlibat dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Meningkatnya Koordinasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	%	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	%	
29. KECAMATAN WARINGINKURUNG			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK --> Unsur Pemerintahan Umum			
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			BAKESBANGPOL
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Nilai	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			BAKESBANGPOL
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kabangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kabangsaan	%	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	

Sumber : RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2025-2030

3. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RKPD

Kegiatan pembangunan daerah merupakan rencana pelaksanaan kegiatan dari rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Serang yang di jabarkan pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025.

Tabel 11. Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
	Program Pengembangan Kebudayaan	1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9. Peningkatan Pelayanan BLUD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Rumah Sakit dr. Dradjat Prawiranegara	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Peningkatan Pelayanan BLUD
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

OPD	Program	Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah
	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 5. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
	Program Kawasan Permukiman	1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penanggulangan Bencana	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Pengembangan Prasarana Pertanian 2. Pembangunan Prasarana Pertanian

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1. Penyimpanan sementara Limbah B3 2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Persampahan	1. Pengelolaan Sampah 2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Khusus Anak	1. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Pelayaran	1. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 3. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 4. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
	Program Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 2. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalumya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi, Informatika, persandian dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

OPD	Program	Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
Dinas Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 2. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 2. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air

OPD	Program	Kegiatan
		Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Fasilitasi Kerja Sama Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8. Layanan Administrasi DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Peningkatan Kapasitas DPRD

OPD	Program	Kegiatan
		5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Fasilitasi Tugas DPRD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Badan Pendapatan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

OPD	Program	Kegiatan
		4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2. Mutasi dan Promosi ASN 3. Pengembangan Kompetensi ASN 4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis 2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

OPD	Program	Kegiatan
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber : RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berikut dasar hukum penerapan SPM:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah karena SPM merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara yang berhak diperoleh secara minimal tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib mendasar yang kewenangannya sudah diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Dasar penerapan SPM yaitu:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Serang yang melaksanakan SPM yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Dinas Sosial

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro adalah sekumpulan indikator gabungan (komposit) yang mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah atau negara. Indikator utama mencakup pertumbuhan ekonomi (PDB/PDRB), tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan gini ratio yang terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 12. Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Serang

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,28	74,10	1,12
2.	Angka Kemiskinan	%	4,51	4,48	-0,67
3.	Angka Pengangguran	%	9,18	8,73	-4,90
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,78	5,17	8,16
5.	Pendapatan Perkapita	Rp.	60,01	108.865,9	6,61
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,267	0,252	-5,62

Sumber data : BPS Kabupaten Serang Tahun 2026

Keterangan:

1. Indeks pembangunan manusia: Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun N dan tahun N-1
2. Angka Kemiskinan: Persentase Penduduk Miskin pada tahun N dan tahun N-1
3. Angka Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun N dan tahun N-1
4. Pertumbuhan Ekonomi: Presentase pertumbuhan ekonomi pada tahun N dan tahun N -1 atas dasar harga konstan
5. Pendapatan Perkapita: PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun N dan tahun N -1 dalam satuan rupiah utuh
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio): Gini Ratio pada tahun N dan tahun N -1

Untuk menghitung perubahan indikator kinerja makro adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Capaian kinerja makro tahun 2025} - \text{Capaian kinerja makro tahun 2024})}{\text{Capaian kinerja makro tahun 2024}} \times 100\%$$

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Serang memperlihatkan capaian indikator yang telah ditentukan di dalam perencanaan Tahun 2024. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya. Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

2.2.1. Indikator Kinerja Hasil

Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Hasil Kabupaten Serang Tahun 2025

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
Urusan Pendidikan							
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	54.036	76,12	%	Disdikbud	-
		Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	70.992				
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	291.316	97,72	%	Disdikbud	-
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	298.115				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14.162	93,50	%	Disdikbud	-
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	15.146				
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	907	33,33	%	Disdikbud	-
		Jumlah seluruh toilet	2.721				
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	2.300	30,98	%	Disdikbud	-
		Jumlah ruang kelas	7.425				
Urusan Kesehatan							
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	20	0,07	%	Dinkes	Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia pada tahun

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah ibu melahirkan tahun N	28.753				2020-2023 berkisar antara 189 hingga 305 per 100.000 kelahiran hidup
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	3.338	3,11	%	Dinkes	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Indonesia menunjukkan tren penurunan, dengan angka SSGI 2024 mencapai 19,8% Target prevalensi stunting Kabupaten Serang thn 2025 yaitu 13,5%
		Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	107.314				
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	29.265	88,17	%	Dinkes	-
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam	33.191				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		kurun waktu satu tahun yang sama					
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	28.835	91,01	%	Dinkes	-
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	31.684				
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	30.171	100,00	%	Dinkes	-
		Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam	30.171				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		kurun waktu satu tahun yang sama					
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	142.610	100,00	%	Dinkes	-
		Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	142.610				
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	274.068	100,00	%	Dinkes	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	274.068				
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.167.428	100,00	%	Dinkes	-
		Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1.167.428				
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	143.484	95,65	%	Dinkes	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	150.015				
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	76.805	97,16	%	Dinkes	-
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	79.048				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.203	100,00	%	Dinkes	-
		Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	13.203				
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.261	97,12	%	Dinkes	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.328				
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	45.999	100,00	%	Dinkes	-
		Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	45.999				
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	43.378	100,00	%	Dinkes	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	43.378				
Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang							
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	1.820,93	19,03	%	DPUPR	-
		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	9.570,75				
1.c.2	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/ kota (Km)	897,81	89,39	%	DPUPR	-
		Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	1.004,39				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	427.626	23,29	%	DPUPR	-
		Jumlah total penduduk kabupaten/kota	1.836.077				
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	352.355	72,01	%	DPUPR	-
		Jumlah rumah di kabupaten/kota	489.311				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	0	0	%	DPUPR	1. Keterbatasan penyusunan dokumen atau kajian 2. Ketidaktersediaan kewenangan Wilayah Sungai (WS) pada Kab. Serang, karena kewenangan tersebut berada di bawah Pemprov dan Pusat/ Balai
		Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1				
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	100,00	%	DPUPR	1. Keterbatasan penyusunan dokumen atau kajian 2. Ketidaktersediaan kewenangan wilayah pesisir pada Kab. Serang
		Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1				
1.c.7	Persentase kepatuhan	Jumlah pemanfaatan	964	100,00	%	DPUPR	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya					
		Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	964				
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	206	100,00	%	DPUPR	-
		Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	206				
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan	30	20,27	%	DPUPR	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis					
		Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	148				
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	22	88,00	%	DPUPR	-
		Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	25				
Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman							
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan	1	100,00	%	DPRKP	Selama pada Tahun 2025 tidak terjadi bencana di Kabupaten Serang.

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		rehabilitasi rumah pada tahun N					
		Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1				
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	105,24	100,00	%	DPRKP	-
		Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	105,24				
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	218	100,00	%	DPRKP	-
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	218				
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	10	100,00	%	DPRKP	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	10				
Urusan Trantibumlinmas							
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	1	33,33	%	BPBD	Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) masih dalam proses asistensi oleh BNPB Pusat
		Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3				
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	35	100,00	%	SATPOL PP	-
		Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	35				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	5	100,00	%	SATPOL PP	-
		Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	5				
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.170	0,84	%	BPBD	-
		Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	375.459				
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	116	100,00	%	BPBD	-
		Jumlah warga negara yang	116				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		menjadi korban bencana					
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	37	61,67	%	BPBD	-
		Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	60				
Urusan Sosial							
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	77	100,00	%	DINSOS	-
		Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	77				
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	43	100,00	%	DINSOS	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	43				
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	27	100,00	%	DINSOS	-
		Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	27				
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1	100,00	%	DINSOS	Hingga Tahun 2025 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya gelandangan dan pengemis belum memperoleh manfaat layanan dasar di luar panti.
		Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	8.284	100,00	%	DINSOS	-
		Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	8.284				
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	147	0,11	%	DINSOS	-
		Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	132.563				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON-PELAYANAN DASAR							
Urusan Tenaga Kerja							

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	38	84,44	%	DISNAKERTANS	-
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	45				
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	381	79,38	%	DISNAKERTANS	-
		Jumlah perusahaan	480				
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan	26.490	100,00	%	DISNAKERTANS	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Belanja Daerah Kabupaten/Kota					
		Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	26.490				
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak							
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	94	78,99	%	DKBP3A	-
		Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	119				
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan	45	88,24	%	DKBP3A	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Orang yang mendapatkan layanan komprehensif					
		Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	51				
Urusan Pangan							
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	408,49	161,22	%	DKPP	-
		Target jumlah cadangan pangan	253,38				
Urusan Pertanahan							
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	2.702.294	20,61	%	BPKAD	-
		Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	13.114.586,95				
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	48.579,10	32,86	%	DPUPR	-
		Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	147.830,54				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	4	25,00	%	DPUPR	-
		Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	16				
Urusan Lingkungan Hidup							
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	39	54,17	%	DLH	-
		Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	72				
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	32.551,722	3,92	%	DLH	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	829.668				
Urusan Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil							
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	540.181	95,80	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	563.870				
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	323.990	60,29	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	537.413				
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100,00	%	DISDUKCAPIL	-
		2 dokumen	2				
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	1.283.493	98,83	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	1.298.670				
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	9.286	100,00	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang	9.286				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		tercatat dan melaporkan					
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	131	100,00	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	131				
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	7	100,00	%	DISDUKCAPIL	-
		Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	7				
Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa							
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	1	100,00	%	DPMD	-
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1				
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria	42	18,18	%	DPMD	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun					
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	231				
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	7	77,78	%	DPMD	-
		Jumlah kerja sama desa yang ditangani	9				
Urusan Pengendalian Penduduk							
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	2,1	95,89	%	DKBP3A	Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun)
		Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,19				
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	208.636	73,70	%	DKBP3A	-
		Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	283.078				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	9,85	89,87	%	DKBP3A	-
		Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	10,96				
Urusan Perhubungan							
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	0,48	0,48	Rasio	DISHUB	Rasio konektivitas kabupaten/kota adalah indeks untuk mengukur tingkat keterhubungan jaringan jalan (jalan, sungai, penyeberangan) yang menghubungkan wilayah tersebut, penting untuk mobilitas orang/barang dan pemerataan ekonomi

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,16	0,16	Rasio	DISHUB	V/C Ratio (Volume to Capacity Ratio) atau derajat kejenuhan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (V) dengan kapasitas jalan (C). Nilai ini digunakan untuk mengukur kinerja jalan, di mana angka mendekati 1,00 menunjukkan jalan macet
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	0,00	%	DISHUB	1. Pada saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, khususnya pada Bidang Angkutan, belum melakukan pendataan secara menyeluruh terkait penerapan Sistem Manajemen Keselamatan. 2. Ketersediaan data yang diperlukan untuk menghitung nilai indikator tersebut masih belum terpenuhi karena belum tersusunnya basis data dan mekanisme pengumpulan data yang terintegrasi terkait Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan pada sektor angkutan di wilayah Kabupaten Serang.
		Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	1				
Urusan Komunikasi & Informatika							

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	58	100,00	%	DISKOMINFOSANTIK	-
		Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	58				
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9	100,00	%	DISKOMINFOSANTIK	-
		Jumlah Layanan Publik	9				
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	1.836.077	100,00	%	DISKOMINFOSANTIK	-
		Jumlah penduduk	1.836.077				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan	
Urusan Koperasi & UMKM								
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	270.318.162.139	-	13,85	%	DISKOUMPERINDAG	-
		Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	313.759.166.556					
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	35.321	71,95	%	DISKOUMPERINDAG	-	
		Σ Usaha mikro	49.088					
Urusan Penanaman Modal								
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	21.516.786.600.511	13,46	%	DPMPTSP	Peningkatan investasi pada tahun 2025 yaitu sebesar 13,46% atau sekitar Rp.2.552.630.375.517	
		Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	18.964.564.454.068					
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	21.516.786.600.511	351,58	%	DPMPTSP	-	
		Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada	6.120.000.000.000					

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		kabupaten/kota yang bersangkutan					
Urusan Kepemudaan & Olahraga							
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	220	0,05	%	DISPORAPAR	-
		Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	446.648				
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	242	0,05	%	DISPORAPAR	-
		Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	446.648				
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	11	1,54	%	DISPORAPAR	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	713				
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	22	81,48	%	DISPORAPAR	-
		Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	27				
Urusan Statistik							
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	4.160	100,00	%	DISKOMINFOSANTIK	-
		Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	4.160				
Urusan Persandian							
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	366	39,87	%	DISKOMINFOSANTIK	Mengukur tingkat kesiapan pengamanan informasi. Indeks ini menilai tata kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, aset, dan teknologi untuk
		Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918				

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
							meningkatkan ketahanan siber
Urusan Kebudayaan							
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	15	39,47	%	Disdikbud	-
		Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	38				
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	1.250	26,65	%	Disdikbud	-
		Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	987				
Urusan Perpustakaan							
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	53,72	53,72	Nilai	DPKD	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	3,52	3,52	Nilai	DPKD	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2025 adalah instrumen Perpustakaan Nasional untuk mengukur kontribusi lembaga perpustakaan dan usaha pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan literasi, dengan fokus pada penyediaan koleksi, pustakawan, dan sarana
Urusan Kearsipan							
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	50,86	50,86	%	DPKD	-
URUSAN PILIHAN							
Urusan Kelautan & Perikanan							
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	67.584,74	152,33	%	DISKAN	-
		Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	44.368,26				
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	43,17	43,17	Kg / Kap / Tahun	DISKAN	-
Urusan Pariwisata							

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	670.098.007.630	3,11	%	DISPORAPAR	-
		Realisasi investasi Tahun N	1.516.786.600.511				
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	52.607	37,78	%	DISPORAPAR	-
		Jumlah wisatawan asing tahun N-1	38.183				
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	3.844.159	17,13	%	DISPORAPAR	-
		Jumlah wisatawan tahun N-1	3.281.915				
Urusan Pertanian							
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	637.982,3	10,08	%	DKPP	-
		Produksi tanaman pangan tahun N-1	579.546				
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi	3.639,55	- 74,42	%	DKPP	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
		hortikultura tahun N-1					
		Produksi hortikultura tahun N-1	14.225,47				
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	62.062.439	5,47	%	DKPP	-
		Produksi komoditas peternakan tahun N-1	58.844.119				
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	13,817721	100,00	%	DKPP	-
		Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	13,817721				
Urusan Perdagangan							
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	628.589	100,00	%	DISKOU MPERINDAG	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	628.589				
Urusan Perindustrian							
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	100	100,00	%	DISKOUMPERINDAG	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota						
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	234	1,95	%	DISKOUMPERINDAG	-
		Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	12.019				
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N	234	95,00	%	DISKOUMPERINDAG	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Nilai Pembilang	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
	dan menengah di kabupaten/kota	– Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1					
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	120				
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	18.211.781.159.193	84,64	%	DISKOUMPERINDAG	-
		Total investasi seluruh sektor	21.516.786.600.511				

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2025

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Perencanaan							
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	15	88,24	%	BAPPERIDA	-
		Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17				

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
Keuangan							
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	1.168.712.385.157	32,32	%	BPKAD	-
		Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.615.967.850.057				
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1.105.550.595.638	31,28	%	BPKAD	-
		Realisasi pendapatan daerah	3.533.969.684.293				
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	2.103.642.845.390	61,18	%	BPKAD	-
		Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	3.438.456.533.241				
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	872.168.712.138	34,79	%	BPKAD	-
		Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2.506.603.331.257				
Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan							
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.776	75,35	%	BKPSDM	-
		Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	2.357				

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
Penelitian & Pengembangan							
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	43	100,00	%	BAPPERIDA	-
		Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	43				
Fungsi Pengawasan							
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	5	5	Nilai	INSPEKTORAT	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1 nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2 nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5.

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	5	5	Nilai	INSPEKTORAT	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5.
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	5	5	Nilai	INSPEKTORAT	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2,

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
							nilai capaian 4; dan e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5.
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	1.291	99,31	%	INSPEKTORAT	-
		Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1.300				
Pengadaan							
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	40	40,00	Poin	Bag. ULP	-
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	29,56	29,56	Poin	Bag. ULP	-
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	27,86	27,86	Poin	Bag. ULP	-
Hubungan dengan Perwakilan Daerah							

No IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Definisi Parameter Pembilang/Penyebut	Nilai Pembilang/ Penyebut	Capaian	Satuan	Sumber Data	Permasalahan
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat	Tepat	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu	BPKAD	-
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	6	100,00	%	Bag. Hukum	-
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	6				
Pelayanan Publik							
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	0	0	Nilai	Bag. Organisasi	Penilaian Maladministrasi pelayanan publik akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak.

Jabatan : Bupati Serang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Serang, Januari 2025
Bupati Serang



Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak.

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KABUPATEN SERANG

TAHUN 2025

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Angka Rata Rata Lama Sekolah			8,22
		Angka Rata Rata Harapan Bersekolah			13,48
			Meningkatnya akses, kualitas dan manajemen pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51
		Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan			93,10%
			Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	93,10%
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional	Meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)			65,68
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka Kematian Ibu	182
				Angka Kematian Bayi	8,19
				Angka Prevelensi Stunting	13,5%
				Presentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi	45%
				Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			60%
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
				Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	89,57
				Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	73,93
				Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75
				Persentase Kawasan Kumuh	0,12
				Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	61,66
				Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	60,69%
				Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	69,7
				Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	40
				Cakupan ketersediaan air baku	100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks Kualitas Air	51,75
				Indeks Kualitas Udara	83,5
				Indeks Tutupan Vegetasi	70,005
				Presentase Penanganan Sampah	24,68
				Presentase Rumah Layak Huni	91,72%
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			4,25-4,5
		Inflasi			1,65
		Tingkat Pengangguran Terbuka			8,96
			Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2,98
				Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	1,97
			Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi Peningkatan SHU Koperasi	2%
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	10
				Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	1,03
				Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB	3,27
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	
				PMA	3%
				PMDN	3%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	18,71
			Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Tingkat Kemiskinan			4,08
		Indeks Gini Rasio			0,266
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,40%
			Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18
				Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	70
				Total Fertility Rate	2,19
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Pelayanan Publik yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi yang Bekerja Integritas, Kompeten dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			BB
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP
				Nilai LPPD	4,40
				Nilai SAKIP	BB
				Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPP	3,8
			Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3,39%
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100
				Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100
				Indek Inovasi Daerah	Inovatif
				Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90,00%
			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	97%
				Cakupan standar kompetensi pegawai	96%
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%
				Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00
				Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	170
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	80,36%
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	92,2
				Indeks Risiko Bencana	202,5
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%
Memantapkan Fungsi dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral dan Spiritual dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat dan Bernegara	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama ditengah tengah masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			89
			Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah tengah masyarakat	0

Lampiran 1

**RENCANA PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF DALAM RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

NO	PROGRAM	ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	677.379.057.987
2	PROGRM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	111.597.900.919
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	350.000.000
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	34.774.840.839
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	112.000.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.680.000.000
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.680.000.000
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	150.000.000
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	450.000.000
DINAS KESEHATAN		
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	182.753.992.408
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAYAN MASYARAKAT	69.826.941.125
12	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	6.000.000.000
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.901.421.500
14	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.691.185.000
RUMAH SAKIT dr. DRAJAT PRAWIRA NEGARA		
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.575.136.958
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHAYAN MASYARAKAT	3.450.000.000
17	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	250.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.734.364.061
19	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	29.235.147.284
20	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.250.000.000
21	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGAMBANGAN SISTEM DRAINASE	6.931.082.250
22	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	183.204.940.000
23	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.116.405.040
24	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	10.920.000.000
25	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.096.620.469
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.729.309.590
27	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	22.000.000.000
28	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	15.190.243.207
29	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	50.000.000.000
30	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	30.950.868.750
31	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	300.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
32	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	13.000.000.000
33	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	11.200.000.000
34	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.100.000.000
35	PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	750.000.000
36	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	500.000.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.622.307.475
38	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.586.983.360
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
39	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.228.120.479
40	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.750.000.000
41	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.000.000.000
DINAS SOSIAL		
42	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.573.349.105
43	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.382.800.000
44	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	120.000.000
45	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.559.000.000
46	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.950.000.000
47	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	985.000.000
48	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	272.000.000
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
49	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.378.981.555
50	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	400.000.000
51	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.075.800.000
52	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.950.000.000
53	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.903.900.000
54	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	370.000.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.441.615.570
56	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.800.000.000
57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.000.000.000
58	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	481.290.000
59	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	378.140.000
60	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.500.000.000
61	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.000.000.000
62	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	750.000.000
63	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.000.000.000
64	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	750.000.000
65	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.500.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.256.076.370
67	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.000.000.000
68	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.000.000.000
69	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	750.000.000
70	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH 3)	500.000.000
71	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	750.000.000
72	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	400.000.000
73	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	500.000.000
74	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	500.000.000
75	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	20.820.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.278.696.212
77	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.200.000.000
78	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	350.000.000
79	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.085.190.920
80	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	150.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN DAN DESA		
81	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.670.957.135
82	PROGRAM PENATAAN DESA	350.000.000
83	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	300.000.000
84	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	438.598.947.514
85	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.500.000.000
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
86	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.842.028.225
87	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	427.820.000
88	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	449.037.500
89	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	485.010.000
90	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	36.602.500
91	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	400.000.000
92	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	908.553.500
93	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.011.506.000
94	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.235.963.725
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.802.218.561
DINAS PERHUBUNGAN		
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.842.550.451
97	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	38.326.924.672
98	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.100.000.000
99	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	110.000.000
100	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	600.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, PERSANDIAN STATISTIK		
101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.988.031.699
102	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.869.000.000
103	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.200.000.000
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.135.091.875
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	577.654.875
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.223.524.408
107	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	145.000.000
108	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	47.930.000
109	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	242.110.000
110	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PENGKOPERASIAN	610.414.800
111	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.055.405.000
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, USAHA MIKRO (UMKM)	1.500.000.000
113	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.150.000.000
114	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	29.500.000
115	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.000.000.000
116	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	280.000.000
117	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.000.000.000
118	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	450.000.000
119	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
120	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	310.000.000
121	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	56.000.000
122	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	120.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.823.471.283
124	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	800.000.000
125	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	500.000.000
126	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	700.000.000
127	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	600.000.000
128	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	900.000.000
129	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	200.000.000
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.843.654.995
131	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.241.000.000
132	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	805.000.000
133	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.500.000.000
134	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.060.000.000
135	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.717.336.000
136	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	500.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
137	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	350.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.172.149.307
139	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	325.000.000
140	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	200.000.000
DINAS PERIKANAN		
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.245.589.360
142	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.942.862.000
143	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	7.271.387.000
144	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	996.530.000
145	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	114.362.000
SEKRETARIAT DAERAH		
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	87.374.065.602
147	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.000.000.000
148	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.400.000.000
SEKRETARIAT DPRD		
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.606.467.575
150	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	47.357.695.400
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.883.416.886
152	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.200.000.000
153	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.000.000.000
154	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.052.534.143
BADAN PENDAPATAN DAERAH		
155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.316.082.724
156	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.768.765.500
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.674.420.589
158	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.500.000.000
159	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.000.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.205.283.067
161	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.528.800.000
162	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.000.000.000
INSPEKTORAT DAERAH		
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.383.365.395
164	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.196.895.455
165	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.000.000.000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	8.300.000.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
167	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	700.000.000
168	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.330.000.000
169	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	750.000.000
170	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.240.000.000
171	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.232.836.897
KECAMATAN		
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	90.706.961.852
173	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.251.800.500
174	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.081.722.700
175	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.242.011.000
176	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.473.700.000
177	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	6.450.765.800
TOTAL		3.135.084.423.303

Serang, Januari 2025

Bupati Serang



Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak.

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja

MISI 1 : Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.

Sasaran 1

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 1 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Akses, Kualitas dan Manajemen Pelayanan Bidang Pendidikan**, sebagai berikut :

Tabel 15. Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Angka Pendidikan Dasar Yang Ditamatkan	Poin	50,51	50,29	99,56	100,16	-0,60	50,51	99,56
JUMLAH					99,56	100,16	-0,60	50,51	99,56
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					99,56	100,16	-0,60	50,51	99,56

Sumber: LKIP Disdikbud tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan** dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **99,56 %** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Pengelolaan Pendidikan

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Program Pengembangan Kurikulum

- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Penduduk kabupaten diluar usia sekolah (diluar usia 15 Tahun) masih banyak yang belum tamat SMP;

- 2) Terdapatnya penambahan/pertumbuhan jumlah penduduk di usia 15 tahun ke atas yang cukup tinggi;
- 3) Meningkatnya jumlah angka tidak sekolah di kabupaten serang, terutama pada penduduk belum pernah bersekolah dan putus sekolah;
- 4) Tingkat ekonomi masyarakat yang kurang mampu.

Solusi

- 1) Pemberian beasiswa bagi penduduk kabupaten serang yang belum lulus SMP melalui pendidikan kesetaraan/nonformal paket B dan paket C;
- 2) Pemberian biaya personil peserta didik SD dan SMP untuk mencegah siswa putus sekolah (DO);
- 3) Pembangunan sarana prasarana untuk meningkatkan akses layanan pendidikan

Penurunan Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami yaitu sebesar **0,60 %**.

Sasaran 2

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 1 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kearifan dan Kelestasian Seni Budaya Lokal Serta Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah**, sebagai berikut :

Tabel 16. Evaluasi Kinerja Misi 1 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Cakupan Event Budaya Skala Kabupaten dan Nasional	%	93,10	95,00	102,04	100,87	1,17	93,10	102,04
JUMLAH					102,04	100,87	1,17	93,10	102,04
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					102,04	100,87	1,17	93,10	102,04

Sumber: LKIP Disdikbud tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kearifan dan Kelestasian Seni Budaya Lokal Serta Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah** dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **102,04 %** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Pengembangan Kebudayaan

- Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Pembinaan Sejarah

- Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Anggaran terkena rasionalisasi (penghematan) sehingga beberapa event budaya tidak terlaksana.

Solusi

- 1) Mencari alternatif penyelenggaraan event budaya tanpa mengandalkan anggaran daerah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **1,17 %**.

MISI 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata Dan Terjangkau Yang Didukung Oleh Tenaga Kesehatan Yang Profesional

Sasaran 1

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 2 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**, sebagai berikut:

Tabel 17. Evaluasi Kinerja Misi 2 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terstandar dan Terakreditasi	%	45	71,43	71,43	65,13	6,30	45	71,43
2	Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	80	98,93	98,93	92	6,93	80	98,93
JUMLAH					170,36	157,13	13,23	125	170,36
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					85,18	78,56	6,61	62,50	85,18

Sumber : LKIP DINKES dan RSUD Dr. Dradjat Prawiranagara Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat** dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **85,18%** dengan kategori **Baik Sekali**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peningkatan Pelayanan BLUD.

Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota;
- Penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota;
- Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-Irt Sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
- Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan *post market* pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga.

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah Kabupaten/Kota;

- Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Kendala pada pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstandar penanganan resti masih belum optimal, rujukan belum sesuai standar;
- 2) Kesedaran untuk melakukan ANC masih kurang ,masih ada nya yang tidak memiliki BPJS , masih ada nya bumil KEK, dan AKI;
- 3) Masih ada nya masalah stunting, BBL dan masalh gizi buruk , gizi kurang dan obesitas dan masih ada AKB;
- 4) Agak sulit mendapat sasaran remaja untuk posyandu remaja yang diselenggarakan di desa karena anak remaja banyak yang di sekolah;
- 5) Belum semua balita stunting mendapat tatalaksana stunting;
- 6) Belum semua klinik akreditasi;
- 7) SDM Nakes belum merata keberadaannya;
- 8) Belum maksimalnya upaya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular di masyarakat untuk sasaran usia produktif (15-59 th) di luar gedung;
- 9) Dukungan lintas program dan lintas sektor serta kerjasama jejaring dengan klinik, TPMD dan Rumah Sakit dalam upaya perluasan deteksi dini belum optimal.

Solusi

- 1) Peningkatan kompetensi tim kibra dengan kegiatan *Drill Emergency*, kunjungan di Dokter spesialis;
- 2) Adanya kelas ibu hamil di posyandu dan adanya pendataan BPJS di bidan desa, jika tidak memiliki BPJS akan diarahkan ke SKTM;
- 3) Adanya kelas ibu hamil di posyandu dan adanya pendataan BPJS di bidan desa, jika tidak memiliki BPJS akan diarahkan ke SKTM Solusi : adanya kelas ibu hamil di posyandu dan adanya pendataan bpjs di bidan desa, jika tidak memiliki BPJS akan diarahkan ke SKTM;
- 4) Pembentukan posyandu remaja di setiap desa, dan penjangiran untuk mengetahui kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 5) Adanya pemberian PMT dan pemantauan pada balita yang stunting;
- 6) Mengupayakan untuk meningkatkan anggaran prevalensi stunting;
- 7) Melakukan pemetaan dan pengkaderan SDM Surveilans Gizi;
- 8) Menganggarkan tata laksana untuk balita stunting;
- 9) Memotivasi klinik untuk di akreditasi;
- 10) Pemenuhan SDM Nakes;

- 11) Memperluas dan meningkatkan upaya skrining PTM dengan cara Melaksanakan PANDU PTM dengan melakukan skrining PTM pada pengunjung puskesmas usia ≥ 15 tahun, baik sehat maupun sakit;
- 12) Melakukan refreshing atau pelatihan kepada kader kesehatan dalam upaya pelaksanaan skrining PTM hingga pencatatan pelaporan melalui ASIK mobil;
- 13) Membentuk Posbindu PTM di sekolah maupun tempat kerja serta melatih siswa/siswi dan pekerja sebagai kader kesehatan di wilayahnya;
- 14) Peningkatan upaya koordinasi lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan cakupan dan kegiatan skrining PTM, pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes mellitus seperti kerjasama dengan faskes swasta (klinik, DPM, BPM) serta Rumah Sakit;

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Peningkatan** yaitu sebesar **6,61 %**.

MISI 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas

Sasaran 1

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 3 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan dan Daerah Serta Aksesibilitas Antar Wilayah**, sebagai berikut :

Tabel 18. Evaluasi Kinerja Misi 3 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa yang telah mendapat pelayanan Air Minum	%	89,57	73,66	73,66	82,80	-9	89,57	0,82
3	Persentase Desa yang telah Mendapatkan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	%	1,11	0,99	89,19	98	-8,81	-	-
4	Persentase Jumlah Bangunan Gedung Daerah Dengan Kondisi Baik	%	75	78,57	78,57	78,5	0	75	1,0476
5	Persentase Kawasan Kumuh	%	0,12	0,13	91,67	107,14	-15,47	0,12	0,13
6	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	%	83,3	83,3	83,3	55	28	83,3	1
7	Persentase Drainase Kota Dengan Kondisi Baik	%	60,96	6,6	6,6	58,08	-51	60,96	0,1082
8	Proporsi Panjang Jaringan Jalan	%	69,70	69,70	89,10	67,32	22	69,96	1,2735

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
	Kabupaten Dalam Kondisi Baik								
9	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang Dalam Pembangunan	%	100	100	100	100	0	100	1
10	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Baik	Point	47,10	10	10	25	-15	40	1
11	Persentase rumah layak huni	%	91,72	100,27	109,32	109,93	0,61	91,72	100,32
12	Cakupan ketersediaan air baku di Kab. Serang	%	100	100	100	100	0	-	0,5
13	Tingkat ketersediaan sarpras pengelolaan persampahan	%	80	22	27,5	0	22,5	-	-
JUMLAH					958,91	981,77	73,83	710,63	207,20
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					73,76	75,52	5,68	71,06	18,84

Sumber : LKIP DISHUB, DPUPR, DLH dan DPRKP Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kawasan dan Daerah Serta Aksesibilitas Antar Wilayah*** dengan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **73,76 %** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu:

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
- Kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Pelayaran

- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau.

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.

Program Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Penataan Bangunan Gedung

- Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota;
- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Penyediaan perlengkapan jalan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Serang, kemacetan Arus lalu lintas terutama pada persimpangan dan pada jam jam sibuk, tidak

semua sarana dan prasarana terpelihara dengan baik, belum tersedianya masterplan transportasi Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RIJLLAJ)

- 2) Paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan Air Minum telah dilaksanakan akan tetapi capaian targetnya menurun dikarenakan : bangunan-bangunan yg telah diserahkan ke masyarakat tersebut sebagian tidak dirawat/dipelihara oleh masyarakat setempat sehingga bangunan yg ada tidak berfungsi dan Penurunan target air minum dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk
- 3) Persentase layanan pengolahan air limbah domestik menurun dikarenakan ada perubahan data dari Dinkes. Jumlah rumah tangga menurun

Solusi

- 1) Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Umum dan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan), Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan, Melaksanakan pemeliharaan Sarana dan prasarana Perhubungan, Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
- 2) Agar persentase capaian target pelayanan air minum tidak menurun maka dibutuhkan kesadaran masyarakat setempat untuk memelihara bangunan layanan air minum
- 3) Agar Persentase capaian target pelayanan air limbah tidak menurun dibutuhkan pendataan ulang.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Peningkatan** yaitu sebesar **5,68 %**.

MISI 4 : Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat, untuk

Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Dan Penanggulangan Kemiskinan dan Desa

Sasaran 1

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas**, sebagai berikut:

Tabel 19. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	2,98	2,98	100	43,57	56,43	3,19	31,34
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	%	1,61	1.61	100	86,33	13,67	1,61	84,29
3	Indeks Ketahanan Pangan	%	77,40	81,39	105,16	105,29	5,29	77,40	1,29
JUMLAH					305,16	235,19	75,39	82,20	116,92
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					101,72	78,40	23,32	27,40	38,97

Sumber : BPS data Realisasi PDRB tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Produktivitas, Ketahanan, dan Peran Ekonomi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas*** dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **101,72 %** dengan kategori ***Baik Sekali***.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- Kegiatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Kegiatan pengembangan prasarana pertanian;
- Kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Kegiatan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.

Program Penyuluhan Pertanian

- Kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);

- Kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 gt di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
- Kegiatan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- Kegiatan pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Kegiatan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Ketersediaan beras dan komoditas pangan lainnya sempat terganggu dikarenakan fenomena elnino yang menyebabkan bencana kekeringan dan terjadinya pergeseran masa tanam dan panen.
- 2) Ketidakersediaan benih kedelai ratu migo dan kurangnya minat petani dalam pengembangan budidaya kedelai.
- 3) Penambahan kegiatan saat anggaran perubahan mengakibatkan pembangunan rehabilitasi rjit kurang mencukupi waktu pengerjaan dan pembayaran dilakukan pada anggaran luncturan tahun 2025.
- 4) Ketidaksesuaian harga benih dan pupuk untuk kegiatan Demplot PPL pada SHS. Harga di SSH lebih rendah jika dibandingkan dengan harga di lapangan.
- 5) Kegiatan SLPHT baru dapat dilaksanakan hanya sekali dalam setahun pada komoditas tanaman pangan saja (padi), sedangkan komoditas hortikultura dan komoditas perkebunan belum dapat dilaksanakan karena masih minimnya anggaran.
- 6) Adanya perubahan atau efisiensi anggaran yang mengakibatkan perubahan perencanaan kegiatan baik dari sisi waktu pelaksanaan, volume ataupun jenis kegiatan
- 7) Minimnya jumlah personil tenaga kesehatan hewan.

- 8) Kendala eksternal seperti masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan kesehatan hewan.
- 9) Kelembagaan petani masih sangat lemah karena kelompok tani hortikultura juga merupakan kelompok tani tanaman pangan.
- 10) Adanya pendampingan hukum sehingga kegiatan monitoring ke penyedia tidak cukup dilakukan hanya 1 kali kunjungan.
- 11) Lebih adanya evaluasi dan solusi untuk honor ASN yang tidak bisa dicairkan sesuai dengan tanggal biasanya.
- 12) Terdapat beberapa fasilitas sanitasi yang rusak seperti tempat cuci tangan dan fasilitas yang belum tersedia seperti tidak adanya tempat sampah di tiap lapak pedagang.
- 13) Teknik budidaya dan penangkapan ikan masih didominasi oleh pembudidaya dan tradisional.
- 14) Dampak cuaca ekstrem menyebabkan produktifitas menurun.

Solusi

- 1) Anggaran yang harus diluncurkan untuk kegiatan Pembangunan Rehabilitasi RJIT
- 2) Kegiatan sosialisasi lalu lintas produk hewan tetap dilakukan berdasarkan Anggaran Provinsi
- 3) Perlu pembinaan secara berkelanjutan baik dari aspek budidaya maupun pasca panen komoditas hortikultura selama melaksanakan kegiatan maupun setelah kegiatan berakhir.
- 4) Meningkatkan produksi pangan lokal melalui pelatihan dan penyediaan sarana pertanian.
- 5) Diversifikasi tanaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
- 6) Perbaikan jalan di daerah sentra produksi.
- 7) Pengadaan fasilitas penyimpanan modern.
- 8) Pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan budaya keamanan pangan di pasar tradisional, diantaranya harus membangun kemitraan yang kuat melalui forum komunikasi pasar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk paguyuban pedagang
- 9) Pembinaan kepada kelompok usaha pentingnya penggunaan metode budidaya dan penangkapan ikan yang lebih produktif melalui intensifikasi.
- 10) Penyesuaian pola tebar budidaya dan waktu melaut menyesuaikan dengan kondisi cuaca

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2022 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **32,59 %**.

Sasaran 2

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Sinergi Dengan Dunia Usaha Perdagangan Dan Industri**, sebagai berikut :

Tabel 20. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	2	-1,96	-98	140	-238	2	-238
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	10	9,59	95,9	139,9	-44	10	-44
3	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Dalam PDRB	%	1,03	2,83	274,75	4708,76	-4708,76	1,03	274,75
4	Pertumbuhan Sektor Industri Dalam PDRB	%	3,27	5,65	172,78	247,80	-75,02	3,27	172,78
JUMLAH					556,43	5.096,46	- 4.814,78	14,3	556,43
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					187,48	1.698,82	- 1.604,93	4,77	185,48

Sumber : Indikator 1 dan 2 dari Dinas KOUUMPERINDAG, Indikator 3 dan 4 dari BPS Kabupaten Serang.

Hasil analisis capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas UMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian baik sekali diatas 100 persen. Untuk indikator 1 proporsi peningkatan SHU koperasi meningkat secara signifikan dari target 2 % realisasi -1,96%, begitu juga dengan pertumbuhan wirausaha baru dari target 10 % realisasi 9,59 atau 95,9 %. Indikator proporsi peningkatan SHU Koperasi tahun ini naik signifikan karena koperasi melalui program pendirian koperasi desa merah putih yang disingkat KDMP menjadi program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2025 berdiri sebanyak 326 KDMP di Kabupaten Serang yang bergerak diberbagai sektor usaha ditingkat desa. Untuk indikator pertumbuhan sector perdagangan dalam PDRB kenapa realisasinya tinggi karena ketika penentuan target PDRB masih TA. 2021-2026 masih menggunakan asumsi pesimis pandemic Covid19. Hal serupa juga terjadi pada indikator ke 4 pertumbuhan sektor industri dalam PDRB.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Bidang Koperasi

Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota.

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- Kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota.

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

- Kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

- Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

- Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Usaha Mikro

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

- Kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Program Pengembangan Umkm

- Kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Bidang Perindustrian

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/ Kota.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota.

Bidang Perdagangan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- Kegiatan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

- Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Ekspor

- Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Permasalahan

Untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Tahun 2025 di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang tidak ada masalah. Ada beberapa catatan untuk perbaikan kedepan terkait pelaksanaan kegiatan antara lain ;

Bidang Koperasi:

- Bidang koperasi secara keseluruhan tidak ada masalah. Namun demikian terkait pelaksanaan program nasional pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Tahun 2025, sebanyak 326 KDMP sudah berdiri di 326 desa se-Kabupaten Serang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Bagaimana koperasi yang sudah berdiri tetap eksis dan berperan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di desa.

Bidang UMKM:

- Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Bidang Usaha Mikro tidak ada masalah. Semua kegiatan berjalan dengan baik.

Bidang Perdagangan:

- Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koumperindag Kabupaten Serang, dalam hal ini Bidang Perdagangan tidak ada permasalahan.

Bidang Industri:

- Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koumperindag Kabupaten Serang , yakni Bidang Industri tidak ada masalah.

Solusi

- 1) Pemerintah baik pusat maupun daerah harus hadir dalam membantu koperasi. Baik melalui pemberian pelatihan, modal usaha, dan lainnya. Terutama bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus jelas kontribusinya sebagai penggerak perekonomian di pedesaan;
- 2) Koperasi harus hadir untuk memerangi pinjaman online yang marak di masyarakat yang dampaknya merugikan;

- 3) Diperbanyak program dan kegiatan yang mengadakan pelatihan dan pemberian bantuan kepada Usaha Mikro;
- 4) Diperbanyak pelatihan dan dan fasilitasi dalam hal pemasaran dan pembukuan;
- 5) Fasilitasi pemasaran baik itu melalui *marketplace*, pameran dan kemitraan dengan para waralaba;
- 6) Fasilitasi UMKM dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya. selain itu dilakukan sosialisasi masalah pembiayaan dengan para UMKM;
- 7) Fasilitasi, pelatihan produk, pemasaran dan kemitraan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **21.61 %**.

Sasaran 3

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 3 yaitu **Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa**, sebagai berikut:

Tabel 21. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Prosentase Desa Maju dan Mandiri Berdasarkan Dari IDM	%	18,71	41.72	223	168,97	75,77	18,71	41,72
JUMLAH					223	168,97	75,77	18,71	41,72
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					223	168,97	75,77	18,71	41,72

Sumber : *Indek Desa Membangun (IDM) Tahun 2025*

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dan Desa** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **223 %** dengan kategori **Sangat Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Penataan Desa

- Kegiatan penyelenggaraan penataan desa.

Program Peningkatan Kerjasama Desa

- Kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa.

Program Administrasi Pemerintah Desa

- Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan personil dan kemampuan aparatur;
- 2) Keterbatasan anggaran biaya untuk Bimtek/Pelatihan-pelatihan;
- 3) Sering berubahnya dan terlambatnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya regulasi berkenaan dengan pengelolaan dan penggunaan keuangan desa dari pusat (kementerian keuangan, kementerian dalam negeri dan kementerian desa sering terlambat);
- 4) Lemahnya koordinasi antar sektor;
- 5) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih kurang;
- 6) Kemampuan sumber daya manusia ditingkat desa masih terbatas;
- 7) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Solusi

- 1) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dinas dan Aparatur Desa melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan sosialisasi, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur;
- 2) Pengajuan penambahan SDM Aparatur atas masih kurangnya pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang;
- 3) Pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana yang masih kurang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, dalam hal ini pengadaan kendaraan dinas/operasional;
- 4) mendata potensi usaha ekonomi desa dan melakukan pendampingan untuk terbentuknya BUMDesa pada setiap desa;
- 5) dalam rangka sinergitas perencanaan, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **75,77 %**.

Keterangan

Data Capaian berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 4

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 4 yaitu **Meningkatnya Daya Saing Dan Produktivitas Tenaga Kerja**, sebagai berikut:

Tabel 22. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	35	38	108	170	-62	35	108
JUMLAH					108	170	-62	35	108
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					108	170	-62	35	108

Sumber : LKIP Disnakertrans Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja**, dengan 1 (Satu) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **108%** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Penempatan Tenaga Kerja

- Kegiatan pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja;
- Kegiatan perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih ada perusahaan yang tidak taat untuk melaporkan penempatan tenaga kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Kurangnya informasi menyebabkan masih adanya pencari kerja yang datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk membuat AK 1 walaupun pembuatan AK 1 sudah dapat dilakukan secara daring

Solusi

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan mengenai wajib lapor penempatan tenaga kerja dan menindak tegas perusahaan yang tidak melaksanakan pelaporan
- 2) Melakukan penyebaran informasi secara lebih luas kepada masyarakat melalui sosialisasi dan media sosial.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **62%**.

Keterangan

Data Capaian berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 5

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 5 yaitu ***Meningkatnya Investasi Daerah***, sebagai berikut:

Tabel 23. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah								
1	PMA TW 3	%	3	-12,68	-422,66	2.420,66	-2.843,32	3	-140.88
2	PMDN TW 3	%	3	63,15	2.105,00	3.715,00	-1.610,00	3	701,66
JUMLAH					1.682,34	6.135,66	-4.453,32	6	560,78
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					841,17	3.067,83	-2.226,66	3	280,39

Sumber : LKIP DPMPSTP Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Investasi Daerah*** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **841,17 %** dengan kategori ***Sangat Baik***.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota.

Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Program Pelayanan Penanaman Modal

- Kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

- Kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).
- Data realisasi investasi belum sepenuhnya akurat dan tepat waktu
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perizinan berbasis risiko

Solusi

- Penyesuaian Pelayanan Sambil Menunggu Integrasi OSS
- Koordinasi intensif dengan BKPM/Kementerian Investasi
- Penguatan pengawasan perizinan bersama OPD teknis terkait.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar 2.226,66 %.

Keterangan

- Data Capaian Berdasarkan LKIP DPMPTSP Kabupaten Serang Tahun 2025
- Laju Pertumbuhan diperoleh dengan rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun 2025} - \text{jumlah investasi tahun 2024}) \times 100 \%}{\text{Jumlah investasi tahun 2024}}$$

Jumlah investasi tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN	TARGET (TRILYUN)	REALISASI	CAPAIAN %	PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI %
1	PMA	2024	2,70	12,42	460,28	72,62
	PMDN	2024	3,25	6,53	201,14	111,45
	Jumlah		5,95	18,96	318,73	84,28
2	PMA	2025	2,78	10,85	390,35	-12,68
	PMDN	2025	3,34	10,66	319,31	63,15
	Jumlah		6,12	21,51	351,58	25,23

Sasaran 6

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah**, sebagai berikut :

Tabel 24. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Kontribusi PAD Pariwisata	Milyar	25.000.000.000	39.903.511.953	159,61	175,34	-15,73	25.000.000.000	159,61%
JUMLAH					159,61	175,34	-15,73	25.000.000.000	159,61%
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					159,61	175,34	-15,73	25.000.000.000	159,61%

Sumber : LKIP Disporapar tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah** dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **159,61 %** dengan kategori **Sangat Baik**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Kegiatan pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota;

Program Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- Kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

- Kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- 1) Adanya Rasionalisasi anggaran sehingga ketercapaian kegiatan dan subkegiatan kurang maksimal
- 2) Kurang banyaknya SDM dalam melaksanakan kegiatan
- 3) Koordinasi antar stakeholder sektor pariwisata

Solusi

- 1) Penyesuaian dan efisiensi anggaran yang telah dialokasikan untuk ketercapaian target
- 2) Penambahan SDM dalam melaksanakan kegiatan
- 3) Koordinasi antar stakeholder pariwisata harus ditingkatkan

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **15,73 %**.

Keterangan

Capaian Kinerja berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025.

Sasaran 7

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 4 sasaran 7 yaitu **Meningkatnya Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Serta Pengendalian Penduduk**, sebagai berikut:

Tabel 25. Evaluasi Kinerja Misi 4 Sasaran 7

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Persentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	%	3	2,95	98,33	90,33	8	3	98,33
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	92,14	92,32	99,80	99,80	0	92,14	99,80
3	Persentase Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Pemenuhan hak anak terselesaikan	%	70	65,03	92,9	89,16	3,74	70	92,9
4	Total Fertility Rate	%	2,19	2,42	91,31	91,31	0	2,19	91,31
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,37	0,66	48,17	0,99	47,18	0	0
JUMLAH					430,51	371,59	58,92	167,33	382,34
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					86,10	74,32	11,78	33,47	76,47

Sumber : LKIP DKBPPPA dan Disdukcapil Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Serta Pengendalian Penduduk*** dengan 5 (Lima) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **86,10 %** dengan kategori ***Baik Sekali***.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
- Kegiatan kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti sosial.

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.

Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota.

Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

- Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Perempuan

- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

- Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota.

Program Perlindungan Khusus Anak

- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga (KS)

- Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- Kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah; kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Kurangnya sarana prasarana dalam menjalankan program kegiatan seperti Rumah Singgah, Mobil layanan Kedaruratan
- 2) Kurangnya SDM Tenaga Profesional seperti Pekerja Sosial, Tim Reaksi Cepat.
- 3) Kurangnya Keakuratan Data PMKS khususnya sasaran Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Solusi

- 1) Melakukan kerjasama dengan mitra Dinas Sosial
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada
- 3) Melakukan Verifikasi ulang di beberapa kecamatan terkait Data SPM

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **11,78 %**.

Keterangan

Data Capaian berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional

Sasaran 1

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, sebagai berikut :

Tabel 26. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	A-	100	100	100	BB (100)	100
2	Nilai LPPD	Point	4,30	3,37	78,37	67,00	11,37	4,30	78,37
3	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	100	100	0	BB (100)	100
4	Tingkat Layanan dan Fasilitas Fungsi DPRD	Indeks	BB	BB	88.92	91.78	-2,92	100	88.92
5	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	%	100	95.51	95.51	95.07	0.44	100	95.51
6	Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	%	100	100	100	100	0	100	100
JUMLAH					562,80	553,85	108,91	504,3	662,8
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					93,80	92,31	18,15	84,05	110,47

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RB dan SAKIP tahun 2025, Nilai LPPD tahun 2023, dan LKIP Setwan

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*** dengan 6 (Enam) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **95,65%** dengan kategori **Baik**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- Kegiatan Penataan Organisasi;
- Penataan Administrasi Pemerintahan;
- Pengelolaan Administrasi.

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD;
- Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD;
- Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD;
- Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Dari sisi Zona Integritas, kesiapan Perangkat Daerah dari segi Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang diusulkan belum sepenuhnya memenuhi Kriteria yang disyaratkan oleh Kemenpan RB;
- Dari sisi SAKIP, adanya penambahan jumlah indikator dibandingkan tahun lalu, sehingga komponen pembagi mempengaruhi hasil dari Capaian SAKIP Pemerintah Daerah di Tahun 2025;
- Dari sisi Indeks Reformasi Birokrasi, capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dicantumkan adalah capaian pada Tahun 2024, karena Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum keluar;
- Dari sisi LPPD, nilai yang dicantumkan adalah nilai LPPD Tahun 2022;

- Belum optimalnya laporan mengenai keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran;
- Tingkat kedisiplinan pemangku kepentingan guna penyusun APBD tepat waktu dan berkualitas masih belum baik;
- Belum optimalnya implementasi Analisis Standar Belanja dalam perencanaan pagu kegiatan;
- Belum tersedianya sistem pengendalian internal terkait pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disertai peningkatan dan pengembangan pengelolaan pemanfaatan BMD;
- Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;

Solusi

- Segera Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi SAKIP, RB dan ZI Tahun 2025, dengan membentuk Rapat dengan Perangkat Daerah terkait;
- Penyusunan APBD dan APBD perubahan tepat waktu;
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembiayaan;
- Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- Optimalisasi sistem informasi data pengelolaan keuangan daerah;
- Peningkatan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- Peningkatan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
- Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- Inventarisasi berkala barang milik daerah;
- Koordinasi, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan barang milik daerah.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **18,15 %**.

Keterangan

- Penurunan Capaian didapat dari hasil Capaian Indeks Reformasi Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, dikarenakan target Indeks RB tahun 2024 adalah CC dan Realisasi Indeks RB tahun 2024 BB maka diperoleh lah hasil 200%, Target Indeks RB tahun 2025 adalah BB dan Capaian Indeks RB tahun 2025 BB maka diperolehlah nilai Capaian nya 100% (Laporan Hasil Evaluasi RB Tahun 2024).

Sasaran 2

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**, sebagai berikut :

Tabel 27. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Tingkat Maturitas SPIP	%	3,80	3,023	79,55	85,27	-5,72	3,70	79,55
2	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti di wilayah Irban	%	100	90,74	90,74	90,58	0,16	0	0
JUMLAH					170,32	175,85	-5,56	3,70	79,55
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					85,16	87,92	-2,78	1,85	39,77

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah** dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **85,16%** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya :

- Terdapat indikator sasaran strategis Pemda dan OPD yang belum cukup menggambarkan sasaran strategis Pemda dan OPD belum berorientasi pada Hasil;
- Kurangnya kualitas perencanaan (implementasi SAKIP) dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan target yang tepat;
- Terdapat sasaran program, yang tidak selaras dengan sasaran di atasnya dan kegiatan yang belum berorientasi hasil, belum smart dan belum memiliki target kinerja yang tepat;
- Kurangnya implementasi IEPK secara menyeluruh;
- Kurangnya identifikasi akar penyebab untuk menyusun pengendalian intern yang efektif guna meminimalisir temuan berulang dan catatan terkait aset dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Solusi

- Melakukan Perbaikan proses Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP;
- Meningkatkan kualitas perencanaan (implementasi SAKIP) dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan target yang tepat;
- Peningkatan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh;
- Peningkatan implementasi IEPK secara menyeluruh;

- Melakukan identifikasi akar penyebab untuk menyusun pengendalian intern yang efektif guna meminimalisir temuan berulang dan catatan terkait aset dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **-2,78 %**.

Keterangan

- Data Capaian Kinerja berdasarkan LKIP Inspektorat Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 3

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 3 yaitu **Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagai berikut :

Tabel 28. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP (100)	WTP (100)	0	WTP (100)	WTP (100)
2	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	3,39	17,29	510,03	222,75	287,28	3,39	510,03
JUMLAH					610,03	322,75	287,28	103,39	610,03
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					305,01	161,37	143,64	51,70	305,01

Sumber : LRA PEMDA Konsolidasi per tanggal 12/01/2026 (capaian bisa berubah setelah adanya LRA audited)

Pada Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.1.178.942.369.555,- dengan realisasi mencapai Rp.944.314.942.625,- atau sebesar 80,10 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun PAD belum sepenuhnya memenuhi target, kinerja pendapatan daerah masih berada pada tingkat yang cukup baik. Di sisi lain, tingkat pertumbuhan PAD pada Tahun 2024 tercatat sebesar 7,44 persen, jauh melampaui target pertumbuhan sebesar 3,34 persen, dengan capaian kinerja mencapai 222,75 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2025, kinerja PAD menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dari target PAD sebesar Rp1.097.550.142.214,- realisasi pendapatan mencapai Rp1.107.574.335.688,- atau sebesar 100,91 persen. Capaian ini mencerminkan semakin optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah. Tingkat pertumbuhan PAD pada Tahun 2025 juga menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi pertumbuhan sebesar 17,29 persen, jauh di atas target sebesar 3,39 persen, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 510,03 persen.

Secara keseluruhan, perkembangan PAD pada Tahun 2024 hingga Tahun 2025 memperlihatkan tren yang positif, baik dari sisi realisasi pendapatan maupun tingkat pertumbuhannya. Peningkatan kinerja ini menjadi indikasi bahwa kebijakan dan strategi

pengelolaan PAD yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Pendapatan Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*** dengan 2 (Dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **305,01%** dengan kategori ***Baik Sekali***.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

Penjelasan atas jenis pajak tahun 2025 yang tidak tercapai

BPHTB :

Pada jenis BPHTB tahun 2025 dari target sebesar Rp.141.361.686.504,- Per 31 Desember 2025 Terealisasi Sebesar Rp.134.097.543.915,- atau 94,86% kekurangan Rp.7.264.142.589,- dapat kami sampaikan bahwa:

- Pembebasan BPHTB terhadap transaksi rumah subsidi (MBR) juga salah satu faktor pengurang atas realisasi BPHTB tahun 2025;
- Kejadian Khusus Cemaran Radiasi Cesium-137 dikawasan industri Modern juga menjadi salah satu faktor penghambat optimalisasi penerimaan BPHTB, informasi dari pengelola Kawasan Industri Modern ada beberapa transaksi tertunda dikarenakan kejadian khusus ini;
- Lost Potensi juga di sebabkan penundaan pembebasan dari pihak investor terhadap lahan pada kawasan serang utara dengan alasan tertentu.

PBJT PERHOTELAN :

Pada jenis PBJT Jasa Perhotelan dari target Rp.22.705.342.000,- per 31 Desember 2025 terealisasi sebesar Rp.22.136.686.188.- atau 97,50% kekurangan Rp.568.655.812.- dimana dapat kami sampaikan bahwa :

- Penurunan realisasi penerimaan PBJT Jasa Perhotelan terdampak dari terbitnya Inpres Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN Dan APBD Tahun Anggaran 2025. Efisiensi belanja sewa hotel sampai dengan 50%. Berdasarkan keterangan wajib pajak bahwa dampak berkurangnya kegiatan sewa hotel yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian-kementerian dan pemerintah provinsi serta

pemerintah kabupaten/kota mengurangi tingkat hunian (occupancy) cukup signifikan ditahun 2025.

OPSEN PKB:

Pada Jenis Opsen PKB target tahun 2025 sebesar Rp.85.690.467.000,- per 31 Desember 2025 Terealisasi sebesar Rp.81.248.169.000 atau 94,82% kekurangan Rp.4.442.298.000,-, dapat kami sampaikan bahwa :

- Penetapan target pada jenis Opsen PKB mempertimbangkan perhitungan yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Banten dalam menyusun target pendapatan.

Solusi

Strategi dalam upaya peningkatan optimalisasi pendapatan pada tahun 2025 diantaranya :

- Program penghapusan sanksi adminitrasi/denda piutang pajak daerah tahun 2025;
- Pemutakhiran data ZNT (Zona Nilai Tanah) pada 2 kecamatan (Kecamatan Bandung dan Kecamatan Puloampel);
- Penilaian individu terhadap objek pajak PBB (42 objek pajak tahun 2025);
- Optimalisasi program-program inovasi terbaru seperti Ketuk Pintu yaitu penagihan pajak yang dilakukan langsung dari pintu ke pintu serta Bapenda Sanjung (program Sasar dan Berkunjung) pada hari libur (weekend) dimana petugas bapenda melakukan pelayanan langsung ke titik titik yang telah dijadwalkan pada hari libur (weekend) untuk melayani para wajib pajak serta pembentukan satuan tugas optimalisasi pendapatan daerah;
- Melakukan kegiatan mobil pelayanan keliling pajak daerah ke 326 desa sekabupaten serang bekerjasama dengan bank BJB;
- Penyesuaian harga air baku sebagai dasar perhitungan nilai perolehan air tanah sesuai Perbup Nomor 91 Tahun 2024;
- Melakukan kegiatan warung BPHTB pada beberapa kecamatan dalam rangka mendekatkan pelayanan dan mengoptimlkan penerimaan BPHTB;
- Melakukan pengawasan terhadap objek retribusi langsung ke lapangan serta mengevaluasi dan berkoordinasi dalam upaya optimalisasi pendapatan secara periodik terhadap opd pengelola retribusi;
- Pelaksanaan kegiatan kegiatan rutin baik pendataan dan penetapan Wajib Pajak baru, penilaian, penagihan, pemeriksaan serta seluruh upaya bidang yang ada pada bapenda terkait optimalisasi pendapatan telah kita optimalkan dan selalu dievaluasi secara rutin dan periodik oleh pimpinan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 **Kenaikan** yaitu sebesar **143,64 %**.

Keterangan

LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025

Sasaran 4

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 4 yaitu ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data, Penelitian, dan Pengembangan Inovasi***, sebagai berikut :

Tabel 29. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Presentase kesesuaian dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan OPD dengan perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks / Kategori Inovasi Daerah	Poin (Inovatif)	44	50,10	100	100	100	100 (Inovatif)	100
4	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	90	90	100	80	10	90	90
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					100	95	77,5	95	97,5
JUMLAH					400	380	310	380	390

Sumber : LKIP Bapperida dan Diskominfo Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data, Penelitian, Dan Pengembangan Inovasi***, dengan 4 (Empat) indikator, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kategori ***Baik***

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah;

- Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

- Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Keterlambatan pelaksanaan jadwal kegiatan;
- Adanya kebijakan pembatasan belanja anggaran.
- Belum optimalnya basis data dan informasi
- Belum termanaatkannya hasil penelitian dan pengembangan secara optimal
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten, daerah tidak memiliki tenaga statistik yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi teknis. Hal ini mempengaruhi kualitas pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

Solusi

- Percepatan pelaksanaan kegiatan; dan
- Adanya kebijakan pembatasan belanja anggaran
- Peningkatan Kapasitas SDM
 - a. Mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga statistik di tingkat daerah.
 - b. Meningkatkan kolaborasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk pendampingan teknis

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 **Kenaikan** sebesar 100%.

Keterangan

Data Capaian Kinerja berdasarkan LKIP Bapperida dan Diskominfo Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 5

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 5 yaitu **Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur**, sebagai berikut :

Tabel 30. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Tingkat Capaian Kinerja Pegawai Kategori Baik	%	97	98,43	101,47	107,2	-5,73	97	101,47
2	Cakupan Standar Kompetensi Pegawai	%	96	97.50	101,5	105,3	-3,8	96	101,5
JUMLAH					202,97	212,50	-9,53	191,50	202,97
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					101,48	106,25	-4,76	95,75	101,48

Sumber : BKPSDM Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur** dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **101,48 %** dengan kategori **Baik Sekali**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN;
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN;
- Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN;
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi;
- Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajemen dan fungsional.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Adanya PPPK Paruh waktu sebanyak 6.057 yang belum diangkat full waktu dan PPPK Penuh waktu menuntut untuk diberikan tunjangan
- 2) Adanya evaluasi dari BPKP terkait pembinaan manajemen resiko secara menyeluruh untuk SDM Inspektorat, Subbag program dan SDM teknis perangkat daerah
- 3) BKN menargetkan seluruh pemda menerapkan manajemen talenta di tahun 2026

Solusi

- 1) Setiap tahun akan ada pengangkatan PPPK Paruh waktu disesuaikan dengan kemampuan anggaran di tahun berjalan

- 2) Telah dilaksanakan kegiatan Bimtek manajemen resiko organisasi sektor publik di lingkungan pemerintah kabupaten serang yang diikuti kepala OPD, Kasubag program dan unsur inspektorat
- 3) Telah dilaksanakan Bimtek Manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Penurunan** yaitu sebesar **4,76 %**.

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 6

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 6 yaitu **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang Didukung Kemajuan TI**, sebagai berikut :

Tabel 31. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 6

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Cakupan pelayanan smart city	%	100	100	100	100	0	100	100
2	Cakupan kepemilikan dan pencatatan sipil	%	92,20	91,09	98,79	108,58	-9,83	92,20	98,79
3	Presentase kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK	%	78,57	83,33	106,05	83,33	0	78,57	106,05
4	Prsentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	44,5	100	100	80	20	44,5	100
5	Presentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan	%	90	17	17	3	14	54,30	17
6	Tingkat keamanan informasi	%	100	100	100	100	0	100	100
JUMLAH					521,84	474,91	24,17	469,57	521,84
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					86,97	79,15	4,03	78,26	86,97

Sumber : LKIP Diskominfosatik Tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang didukung Kemajuan TI** dengan 6 (Enam) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **86,97 %** dengan kategori **Baik**

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Sistem pemrogram dengan bahasa program berbeda agak menyulitkan untuk integrasi. masih adanya kepentingan sektoral di OPD dalam sistem informasi;
- 2) Kompetensi SDM terkait audit internal TIK;
- 3) Birokrasi yang Berbelit-belit;
- 4) Adanya Keterlambatan Pelaksanaan karena ada revisi rincian kegiatan.

Kegiatan ITSA oleh BSSN baru bisa dilaksanakan ditahun 2026 sesuai jadwal yang diberikan oleh BSSN dan Kegiatan Literasi Keamanan Informasi Baru dilaksanakan ditriwulan IV setelah anggaran Perubahan disahkan. Surat tanda registrasi terkait Verifikasi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber dari BSSN belum bisa diterbitkan.

Solusi

- 1) Koordinasi yang baik antar lintas perangkat daerah dan unit kerja terkait.
- 2) Mengadakan Kegiatan Literasi Keamanan Informasi untuk Pegawai Pemerintah Kabupaten Serang pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya, sehubungan telah tersusunnya SK Bupati Tentang Pembentukan TTIS dan tersedianya dukungan anggaran dan regulasi terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi untuk kegiatan Pendampingan ISO 27001:2022 SMKI.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **4,03 %**.

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

Sasaran 7

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 5 sasaran 7 yaitu **Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan bencana**, sebagai berikut :

Tabel 32. Evaluasi Kinerja Misi 5 Sasaran 7

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	%	5	5,41	5,41	7,5	2,09	5	5,41
2	Cakupan pelayanan kebakaran di wilayah Kabupaten Serang	%	100	67,61	67,61	96,67	-29,06	100	67,61
3	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang	%	100	96,18	96,18	92,33	3,85	100	96,18
JUMLAH					105,08	65,5	-23,11	205	171,2
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					35,02	21,8	-7,70	68,3	57,06

Sumber : E-SPM BANGDA 2025 & 2024

Hasil analisis capaian kinerja sasaran ***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang didukung Kemajuan TI*** dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **35,02 %** dengan kategori **Kurang**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pelayanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana;
- Kegiatan pelayanan penyelamatan & evakuasi korban bencana

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota;
- Kegiatan pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat daerah Kabupaten/Kota

Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Masih terdapat masyarakat yang kurang paham terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Serang, Masyarakat yang melakukan usaha tidak mementingkan situasi dan lingkungan di sekitar tempat usahanya;
- 2) Keterbatasan personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serang sehingga belum bisa mengcover seluruh wilayah di Kabupaten Serang;
- 3) Masih kurangnya Anggota PPNS dalam penegakan Perda/Perkada;
- 4) Keterbatasan SDM Kearsipan yang menguasai Teknologi Informasi , wawasan dan pengetahuan tentang kearsipan;
- 5) Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan arsip secara digital dan manual;
- 6) Perkembangan Teknologi yang lebih maju dalam memudahkan akses informasi dan bahan bacaan, sehingga daya tarik Masyarakat berkurang untuk melakukan kunjungan ke Perpustakaan;
- 7) Kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya membaca;
- 8) Belum ada nya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai Dokumen rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra-bencana, penanganan bencana, pasca-bencana untuk 5 tahun kedepan;
- 9) Sarpras penanganan bencana dan kebakaran kurang memadai;
- 10) Kurangnya peningkatan kapasitas aparaturnya bencana dan kebakaran.

Solusi

- 1) Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan baik di lapangan atau pun dengan mengundang masyarakat yang melakukan usaha tentang Peraturan Daerah dan Perlunya Koordinasi dengan OPD terkait perihal atau Permasalahan dalam Penegakan Perda;
- 2) Merekrut anggota polisi pamong praja dengan jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi agar rasio jumlah personil Satpol PP sesuai dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di Kabupaten Serang agar pelayanan kepada masyarakat dapat di tingkatkan;
- 3) Melakukan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat PPNS;
- 4) Pelatihan SDM Kearsipan secara kontinu untuk pengelolaan arsip secara manual maupun digital;
- 5) Pemenuhan kebutuhan fungsional Arsiparis di seluruh perangkat daerah;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana berupa perangkat pendukung digitalisasi arsip;
- 7) Pemenuhan record center /ruang arsip di seluruh perangkat daerah;

- 8) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kearsipan di seluruh perangkat daerah;
- 9) Membuat program yang menarik dan menyediakan koleksi yang beragam sehingga perpustakaan menjadi sarana rekreasi dan edukasi yang menarik bagi masyarakat;
- 10) Menggunakan Dokumen Masterplan Bencana sebagai pedoman sementara hingga tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana;
- 11) Mengoptimalkan sarpras kebencanaan & kebakaran yang ada serta melakukan kerjasama dengan Instansi terkait;
- 12) Melakukan peningkatan kapasitas aparaturnya kebencanaan dan kebakaran dengan kerjasama dengan instansi terkait.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Kenaikan** yaitu sebesar **-7,70 %**.

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025;

MISI 6 : Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara

Sasaran 1 :

Hasil pengukuran capaian kinerja misi 6 sasaran 1 yaitu **Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama**, sebagai berikut :

Tabel 33. Evaluasi Kinerja Misi 6 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025		CAPKIN 2025 (%)	CAPKIN 2024 (%)	CAPKIN 2025 - 2024 (%)	TARGET RPJMD 2025	CAPKIN 2025 : RPJMD (%)
			TARGET 2025	REALISASI 2025					
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	89	71,50	71,50	70,80	71,50	89	71,50
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Kejadian	0	0	100	100	100	0	100
JUMLAH					171,5	170,8	171,5	89	171,5
RATA RATA CAPAIAN SASARAN					85,75	85,4	85,75	44,5	85,75

Sumber : LKPJ Kabupaten Serang tahun 2025

Hasil analisis capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Toleransi Kehidupan Umat Beragama** dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar **71,50 %** dengan kategori **Baik**.

Sasaran tersebut dicapai program dan kegiatan antara lain yaitu :

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan

Dari serangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- 1) Capaian Realisasi Anggaran Rendah dikarenakan kondisi keuangan Pemerintah Daerah;
- 2) SDM masih kurang memadai.

Solusi

- 1) Dari sisi anggaran lebih ditingkatkan dalam rangka menunjang program kegiatan;
- 2) Adanya dukungan personil yang kompeten pada badan kesbangpol.

Pencapaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025, jika dibandingkan dengan angka rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2024 mengalami **Peningkatan** yaitu sebesar 0,70%

Keterangan

- 1) Data Capaian Kinerja berdasarkan LKIP Badan Kesejahteraan Bangsa dan Politik tahun 2025.

BAB III

CAPAIAN KENERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam melaksanakan tugas urusan yang diemban Pemerintah daerah, Kabupaten Serang menjalankan sesuai dengan pedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Pemerintah Kabupaten Serang pada tahun 2025 tidak melaksanakan Tugas Pembantuan, baik berupa Tugas Pembantuan yang diberikan maupun tugas pembantuan yang diterima.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Pendidikan daerah kabupaten/kota mencakup 3 (tiga) pelayanan dasar yaitu:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama); dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

1. Standar Jumlah Dan Kualitas Barang dan/Atau Jasa;
2. Standar Jumlah Dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Tata Cara Pemenuhan Standar.

Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan yaitu:

1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
3. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang.

4.1.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2025

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai SPM Urusan Pendidikan di Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 34. Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 - 2029

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	70371
2	Pelayanan Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	Orang	297475
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	5505

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Tabel Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	70371	54036	76.79 %
2	Pelayanan Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	Orang	297475	293875	98.79 %
3	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	5505	5405	98.18 %

Capaian Indikator SPM dari ketiga jenis pelayanan dasar Kabupaten Serang Tahun 2025 terhadap target yang ditentukan hanya pelayanan Pendidikan Dasar yang mempunyai indikator SPM dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 91,25% dan capaian terbesar pada capaian indikator pada pelayanan pendidikan Dasar.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang sebagai berikut:

Tabel 36. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR SPM	SATUAN	PAGU ANGGARAN
		URUSAN WAJIN PELAYANAN DASAR		
		URUSAN PENDIDIKAN		3.973.866.552
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	-	-
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar SD/MI, SMP/MTs)	-	-
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	-

4.1.5. Dukungan Personil

Suatu organisasi atau lembaga membutuhkan dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat berjalan secara optimal. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 beberapa kali diubah dan terakhir diubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sampai dengan bulan Desember 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memiliki pegawai yang mendukung pencapaian SPM pada Urusan Pendidikan seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 37. Jumlah Pegawai Pendukung Pencapaian SPM Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	DUKUNGAN PERSONIL
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	3835
2	Program SPM Pendidikan Dasar	8205
3	Program Pendidikan Kesetaraan	702

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dukungan alokasi anggaran dan personil berupaya untuk memberikan pencapaian SPM urusan Pendidikan Kabupaten Serang Tahun 2025 sesuai dengan target. Dalam pencapaian target pada pelaksanaannya masih ditemui kendala. Kendala berupa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan selanjutnya dalam mencapai target SPM. Berikut Permasalahan beserta dengan solusinya:

- Angka Partisipasi Kasar Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Serang dari tahun 2021 sampai tahun 2025 masih belum mencapai target. Hal itu disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai usia keemasan anak (golden age);
- Sarana dan Prasarana Pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar yang masih belum merata dan lengkap
- Belum tercapainya Angka Partisipasi Murni SMP (usia 13-15). Hal tersebut menunjukkan masih adanya penduduk usia 13-15 yang tidak bersekolah.

Solusi

1. Dalam upaya untuk meningkatkan / tercapainya target Angka Partisipasi Kasar PAUD upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi penuntasan PAUD 1 Tahun pra SD dan PAUD HI;
 - b. Mendorong / membantu masyarakat yang akan mendirikan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Berkoordinasi dengan Kemenag yang mengelola layanan pendidikan RA terutama terkait dengan upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Memberikan beasiswa S1 bagi guru PAUD yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/ DIV sehingga diharapkan kualitas guru akan menjadi lebih baik.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya mendapat dukungan anggaran berupa DAK, Ban Gub.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi adanya penduduk usia 13-15 yang tidak bersekolah / Sekolah di luar Kabupaten Serang berupa :
 - a. Meningkatkan akses layanan pendidikan khususnya di wilayah perbatasan agar penduduk di wilayah perbatasan bersekolah di kabupaten Serang;
 - b. Memberikan biaya personil khususnya bagi siswa tidak mampu untuk menghindari putus sekolah;
 - c. Menyiapkan biaya personil / Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak bersekolah agar dapat bersekolah kembali di jalur formal maupun non formal.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan pada Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan

dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Kesehatan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Serang terdiri dari :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia Kesehatan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan/preventif.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Kesehatan mencakup:

1. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan; dan
3. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Dalam penyelenggaraannya, SPM Urusan Kesehatan dibuat berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Serang.

4.2.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2025

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai SPM Urusan Kesehatan di Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 38. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	33191
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	31684
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30171
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	142610
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Orang	262357
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	1167428
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	150015
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	79048

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13127
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	2328
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	36996
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	43665

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	33191	32,002	96.42 %
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	31684	28,753	90.75 %
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	30171	28,887	95.74 %
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Orang	142610	139,320	97.69 %
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	Orang	262357	262,357	100.00 %
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan	Orang	1167428	1,167,428	100.00 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
	pada Usia Produktif	sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun				
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Orang	150015	133,201	88.79 %
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	79048	76,804	97.16 %
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	13127	13,203	100.00 %
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	2328	2,276	97.77 %
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	36996	36,996	100.00 %
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	Orang	43665	43,666	100.00 %

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Serang sebagai berikut :

Tabel 40. Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR/ SPM	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90,931,300
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	150,500,100
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	55,371,300
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 12–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	66,321,200
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	48,962,200
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	32,140,240
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	58,506,500
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	34,243,800
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,933,300
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	95,598,400
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu 1 tahun	22,272,000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun	31,213,240

4.2.5. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian SPM baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang sudah terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu tersebar di 31 wilayah kerja puskesmas yang ada di Kabupaten Serang. Untuk ketersediaan tenaga kesehatan baik dalam jumlah maupun penyebarannya di 31 puskesmas masih belum merata, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan terkait SPM masih terkendali / dapat dilaksanakan. Berikut rincian SDM Kabupaten Serang tahun 2025 :

Tabel 41. Jumlah Personil yang Terlibat Dalam Pencapaian dan Penerapan SPM Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
1	Dokter	79
2	Dokter gigi	35
3	Perawat	368
4	Bidan	677

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
5	Promosi Kesehatan	30
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	26
7	ATLM	37
8	Tenaga Gizi	35
9	Tenaga Kefarmasian	37

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

- 1) belum melaksanakan pendataan baik jumlah penerima, mutu barang dan jasa serta SDM dikarenakan keterbatasan anggaran dan SDM,
- 2) belum memanfaatkan aplikasi Siscobikes yang disediakan Kementerian Kesehatan untuk mempermudah pengelola dalam penghitungan kebutuhan,
- 3) target pemenuhan belum diselenggarakan secara bersama-sama antara pengelola baik di tingkat pelayanan dasar maupun di Dinas Kesehatan,
- 4) Proses monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin,
- 5) Tim penerapan SPM belum bekerja sesuai ketentuan.

➤ Solusi

- 1) Melaksanakan rekapitulasi data sesuai nama dan alamat penerima pelayanan dasar pada saat bertemu / kontak saat pelayanan baik di desa / puskesmas / Kabupaten, melakukan stock opname barang, rekapitan disatukan di Tingkat dinkes untuk disusun dan di buat SK target SPM,
- 2) Pemanfaatan aplikasi Siscobikes oleh semua pengelola SPM dalam proses penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar satuan harga yang berlaku baik di tingkat pelayanan dasar maupun dinkes,
- 3) Menyusun jadwal kegiatan serta melaksanakannya oleh Tim Penerapan SPM sesuai ketentuan,
- 4) Menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar oleh Tim Penerapan SPM dan dibuat SK Kepala Dinas Kesehatan serta diserahkan ke Tapem Sekda untuk dibuatkan SK Kepala Daerah.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-

masalah Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SPM bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mencakup 2 (dua) pelayanan dasar yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Menjamin ketersediaan akses Air Limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum mencakup:

1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Mutu Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Mutu pelayanan dasar setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

1. Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang

Jasa mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 42. Ukuran SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: • Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. • Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.

		• Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atauasin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air • Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. • Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.
--	--	---

Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap airminum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sebagai berikut:

$$SPM \text{ "Kabupaten/Kota"} = \frac{\text{Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Rumah Tangga di "Kabupaten/Kota"}} \times 100\%$$

Pembilang adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut adalah jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.

Mutu Pelayanan Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Limbah Domestik

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

1. Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

2. Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari :

- a. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim diwilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan
- b. Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim diwilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

4.3.2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai SPM Urusan Pekerjaan Umum di Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 43. Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	7605
2	Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	39

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

Tabel 44. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Orang	7605	7605	100.00 %
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Orang	39	39	100.00 %

Penjelasan lebih rinci dari pencapaian SPM tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari mencapai 100,00%
Capaian pemenuhan kebutuhan air minum sehari- hari belum memenuhi target. ditargetkan cakupan layanan air minum perpipaan akan meningkat pada tahun 2025.
2. Ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik mencapai 100,00%
Berdasarkan kondisi eksisting data capaian pada tahun 2025, cakupan layanan akses pengolahan air limbah domestik masih belum mencapai target. Dari 100% yang ditargetkan baru mencapai 100,00%.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang sebagai berikut :

Tabel 45. Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	19,386,020,116
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2,336,557,896

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Serang, yang menjalankan Urusan Pekerjaan Umum Bidang Air Minum dan Air Limbah, dalam proses penerapan dan pencapaian SPM didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dukungan personil dalam melaksanakan pencapaian Urusan Pekerjaan Umum bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut :

Tabel 46. Jumlah Pegawai yang Terlibat Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Dukungan Personil	Hasil Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	29	84,66
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	26	63,89

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum sub bidang Bidang Air Minum dan Air Limbah adalah sebagai berikut :

➤ Permasalahan

1. Sulit ditemukannya sumber air tanah yang layak di daerah Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, dan Kecamatan Tirtayasa;
2. Adanya daerah di Kabupaten Serang yang termasuk daerah NONCAT (Cekungan Air Tanah) sehingga tidak dimungkinkan dilakukan pengeboran;
3. Belum adanya database Air Minum dan sanitasi yang akurat dan detail; dan
4. Belum memiliki baseline akses air limbah di Kabupaten Serang yg permasalahan.

➤ Solusi

1. Adanya kerja sama dengan PDAM untuk penyediaan air minum di daerah-daerah untuk penyediaan air minum di daerah Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara serta di daerah yang kategori daerah NONCAT.
2. Dilakukan pencarian sumber-sumber air alternative misalnya mata air, Penampung Air Hujan, Waduk dan lain-lainya.
3. Adanya kegiatan pendataan akses air minum dan air limbah yang dilakukan secara akurat dan detail (by nama by address).
4. Adanya kegiatan pendataan akses air limbah yang dilakukan secara akurat dan detail (by nama by address)

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat pada Pemerintahan Kabupaten Serang tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, dengan adanya sinkronisasi data dengan kinerja kegiatan terkait dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, juga Dinas Lingkungan Hidup sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi dalam Peraturan Kementerian PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan dasar tersebut meliputi:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM yang tercantum merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat mencakup:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota meliputi:
 - Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan dasar yang ada merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kualitas barang/ jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
 - a. Rehabilitasi rumah korban bencana

- Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- b. Pembangunan Kembali Rumah bagi korban bencana.
Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - c. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak/ringan memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/ Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.
 - d. Bantuan akses rumah/sewa layak huni bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa (dengan spesifikasinya sesuai NSPK).
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
- Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
 - a. Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku.
 - b. Subsidi Uang Sewa
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak.
 - c. Penyediaan Rumah Layak Huni
Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup massif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyelesaian dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi bencana gempa yang sesuai dengan NSPK

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara Umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1. Minimnya Anggaran Pelaksanaan Penerapan SPM
2. Belum terlaksananya Proses Pengumpulan dan Pendataan secara Maksimal
3. Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan,
4. Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana pada saat pengumpulan data, khususnya masalah ketersediaan SDM yang masih sangat minim,
5. Belum dapat mengajukan melalui DAK integrasi dalam penambahan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya Readiness Criteria (RC) yang dibutuhkan,
6. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

➤ Solusi

Untuk meningkatkan kualitas pendataan SPM perumahan rakyat di Kabupaten Serang, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang terjangkau, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi, sejalan dengan inisiatif Satu Data.

4.5. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sub Urusan Bencana dan Kebakaran

Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Kebakaran pada Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kebencanaan dan acuan dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Dan Kebakaran antara lain:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Jenis Pelayanan dasar Sub Urusan Bencana Kabupaten Serang meliputi:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Satpol-PP dan sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum dan mengacu dalam target pencapaiannya serta peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mutu pelayanan berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang dengan Jenis Pelayanan Dasar adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator Pencapaian SPM Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perwal.

Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup:

Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.5.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2025

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 51. Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	326
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	165056
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	165056
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8340
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	60

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Orang	326	326	100,00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	165056	165056	100,00 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	165056	165056	100,00 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8340	8340	100,00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Orang	60	37	61,67 %

Pelayanan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdapat empat indikator pelayanan yang seluruhnya telah mencapai 100%. Pada pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan Perda dan Perkada tercatat sebanyak 326 orang. Selanjutnya pada pelayanan informasi rawan bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi mencapai 165.056 orang. Pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan juga sebanyak 165.056 orang. Sementara itu, pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, jumlah warga negara yang memperoleh layanan tercatat sebanyak 8.340 orang.

Selain itu, pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, jumlah warga negara yang memperoleh layanan sebanyak 37 orang dengan persentase capaian sebesar 61,67%, sehingga capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan telah dilaksanakan namun masih belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan sub urusan Bencana dan sub urusan Kebakaran Masyarakat serta Sub Urusan Kententeraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 53. Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	2,504,544,736
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2,000,000,000-
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-

4.5.5. Dukungan Personil

Berikut dukungan personil dalam pencapaian SPM Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang Tahun 2025

Tabel 54. Dukungan Personi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	DUKUNGAN PERSONIL	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	62	100 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	13 orang	96,67%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		94,38%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	87 orang	97,50%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	136 orang	67,61%

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. BPBD

➤ Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan instansi dan stake holder terkait untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, termasuk diantaranya dengan dunia usaha. Untuk pencegahan dan

penanggulangan bencana dan kebakaran, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan relawan di kecamatan agar respons time tanggap darurat bencana dan kebakaran dapat tercapai, dan untuk penanggulangan kebakaran BPBD Kabupaten Serang telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha sehingga target respons time tanggap darurat kebakaran dapat tercapai.

➤ **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan instansi dan stake holder terkait untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, termasuk diantaranya dengan dunia usaha. Untuk pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran, BPBD Kabupaten Serang bekerja sama dengan relawan di kecamatan agar respons time tanggap darurat bencana dan kebakaran dapat tercapai, dan untuk penanggulangan kebakaran BPBD Kabupaten Serang telah menjalin kerja sama dengan dunia usaha sehingga target respons time tanggap darurat kebakaran dapat tercapai.

b. SATPOL PP

➤ **Permasalahan**

Kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada masih belum optimal karena belum terjalinnya kerjasama dengan OPD terkait dalam memenuhi pelayanan dampak penegakan Perda dan Perkada

➤ **Solusi**

Melakukan kerjasama dengan OPD terkait dalam pemenuhan penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial pada Pemerintahan Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Sosial dalam target pencapaiannya mengacu peraturan penerapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial di Kabupaten Serang terdiri dari:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar diluar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial mencakup:

1. Standar dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar dan jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap jenis layanan dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan untuk Pelayanan Dasar yang diberikan berdasarkan kewenangan Kabupaten Serang adalah:

1. Penyandang Disabilitas Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti;
2. Anak Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam dan di luar panti;
3. Lanjut Usia Telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
5. Korban Bencana daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM Tahun 2025

Target pencapaian yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai SPM Urusan Sosial di Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 55. Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	77
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	43
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	27
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Orang	1
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	Orang	8284

4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian indikator SPM pada Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 dan capaian indikator SPM terhadap Target yang ditentukan adalah sebagai berikut:

Tabel 56. Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	77	77	100,00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	43	43	100,00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Orang	27	27	100,00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	Orang	1	1	100,00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang	Orang	8284	8284	100,00 %

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	SATUAN	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
	Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana				

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan jumlah anggaran yang berada pada anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang sebagai berikut :

Tabel 57. Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	ANGGARAN (RUPIAH)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	314,143,527
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana	845,822,825

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Serang, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di mana sampai dengan bulan Desember 2024 Dinas Sosial Kabupaten Serang memiliki pegawai yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 58. Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Serang Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN	DUKUNGAN PERSONIL	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	8	100%

NO	JENIS PELAYANAN	DUKUNGAN PERSONIL	HASIL CAPAIAN (PERSENTASE)
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	8	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	8	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	8	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	205	100%

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan

1. Pengumpulan Data:

Belum Optimal dalam verifikasi dan validasi Data PMKS di setiap Desa diwilayah Kab Serang

2. Penghitungan Kebutuhan:

Ada beberapa sub kegiatan yang memang sifatnya kasuistik yang tidak bisa ditargetkan

3. Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran belum dapat memenuhi kebutuhan Capaian SPM secara maksimal

4. Pelaksanaan

Keterbatasan SDM dan Stakeholder dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum optimalnya Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan penanganan PMKS.

➤ Solusi

Dukungan komitmen semua stakeholder

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

Tabel 59. Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Kabupaten Serang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
3	Program Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)

NO	PROGRAM	KEGIATAN
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)

4.7.2. Urusan Kesehatan

Tabel 60. Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Kabupaten Serang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Spm Pendidikan Dasar Program Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif
		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi
		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 61. Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Serang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 62. Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Serang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

4.7.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 63. Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Serang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		Investigasi Kejadian Kebakaran
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

4.7.6. Urusan Sosial

Tabel 64. Program dan Kegiatan Urusan Sosial Kabupaten Serang

No	Program	Kegiatan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang secara umum meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian SPM, serta akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Pada LPPD Tahun 2025 disampaikan laporan meliputi :

1. Capaian kinerja makro
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - a. 6 Urusan wajib pelayanan dasar
 - b. 18 Urusan wajib non pelayanan dasar
 - c. 8 Urusan pilihan dan
 - d. Fungsi penunjang urusan pemerintahan
3. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah
4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan jika ada
5. Capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ke-5 laporan di atas sebagai bentuk keselarasan dengan Visi dan misi serta program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan pelaksanaan dan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan delapan isu strategis daerah Tahun 2025. Sebagai gambaran kenaikan dan penurunan terhadap kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada capaian Indikator Makro sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan yakni tumbuh sebesar 1,12%
2. Angka Kemiskinan mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,48% atau turun sebesar 0,67% dalam arti membaik.
3. Angka Pengangguran menunjukan tren menurun dengan capaian sebesar 8,73%

4. Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat berdasarkan Angka PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa ekonomi di Kabupaten Serang tumbuh sebesar 8.16% dibandingkan tahun lalu
5. Pendapatan Perkapita mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,61%
6. Ketimpangan Pendapatan turun dengan capaian sebesar 0,252 poin dibandingkan tahun lalu yaitu 0,267 poin

Secara menyeluruh pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Serang pada Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup berarti, dapat disadari pula masih banyak permasalahan yang belum ditangani secara optimal karena terkendala dengan aspek lain, baik terkait dengan keterbatasan maupun regulasi. Tentu saja hal tersebut tidak menyurutkan langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. dengan segenap kerendahan hati, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Serang memohon maaf sebesar-besarnya bila masih terdapat hal-hal yang dirasa belum sesuai dengan harapan masyarakat. Kekurangan-kekurangan yang ada merupakan bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2026, dan perencanaan Tahun 2027.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Maret 2026
Bupati Serang



[Handwritten Signature]
HJ. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd., M.M.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

<https://bit.ly/EvidenLPPD2025>